

**ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR
PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERTANIAN, TRANSPORTASI,
DAN PERTAHANAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK
BRUTO (PDB) DI INDONESIA TAHUN 1980-2017**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU EKONOMI ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

OLEH:

**YUYUN AQIDAH
15810115**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 550821, 512474, Fax. (0274) 586117
E-mail: febi@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-661/Un.02/DEB/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : "ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERTANIAN, TRANSPORTASI, DAN PERTAHANAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DI INDONESIA TAHUN 1980-2017"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

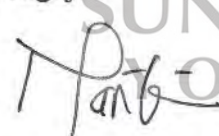
Nama : YUYUN AQIDAH
NIM : 15810115
Telah diujikan pada : Kamis, 01 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang


Muh. Rudi Nugroho, S.E., M.Sc.
NIP. 197519820219 201503 1 002

Penguji I


Dr. Sunaryati, SE., M.Si.
NIP. 19751111 200212 2 002

Penguji II


Lailatis Syarifah, M.A.
NIP. 1982079 201503 2 002

Yogyakarta, 09 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
DEK A N


Dr. H. Syafiq Mahfmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FE-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Yuyun Aqidah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Yuyun Aqidah
NIM : 15810115
Judul : **“Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Transportasi, dan Pertahanan Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Di Indonesia Tahun 1980-2017 ”**
Skripsi

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2019
Pembimbing,

Muh. Rudi Nugroho, S.E., M.Sc.
NIP. 19820219 201503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yuyun Aqidah

NIM : 15810115

Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Transportasi, dan Pertahanan Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Di Indonesia Tahun 1980-2017”** adalah benar-benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* atau daftar pustaka. Apabila lain waktu terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Agustus 2019

Penyusun



Yuyun Aqidah
NIM. 15810115

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai *civitas* akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuyun Aqidah
NIM : 15810115
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*non exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Transportasi, dan Pertahanan Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Di Indonesia Tahun 1980-2017”.

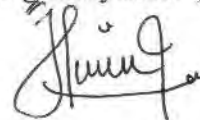
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penyusun atau sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada tanggal: 8 Agustus 2019

Yang menyatakan,



Yuyun Aqidah

MOTTO

*“Ojo Ngoyo-ngoyo Kabeh kuwí Ono
Sing Ngatur, Tapi Ikhtíar Iku
Wajib”*

(KH. Muhaiminan Gunardho)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua

Bapak Mukhsin

Ibu Siti Magsaroh

Suami tercinta, Alia Mahmud Hasan Fauzi

Adik-adikku, Muhammad Farhan Habibi dan Faiza Khurin'in

Terimakasih, Kalian Harta yang paling Berharga

Serta Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata arab yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā ^ʿ	b	Be
ت	Tā ^ʿ	t	Te
ث	Šā ^ʿ	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Hā ^ʿ	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā ^ʿ	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā ^ʿ	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

ظ	Syin	sy	Es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā"	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā"	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā"	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
و	Mim	m	Em
و	Nūn	n	En
و	Waw	w	W
و	Hā"	h	Ha
ء	Hamz	‘	Apostrof
ي	ah	Y	Ye
	Ya		

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

يَعْدَّة	Ditulis	Muta"addidah
عْدَّة	Ditulis	„iddah

C. *Ta'marbūtah*

Semua *Ta'marbūtah* ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang dikutip oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

ح كة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جسية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
راية ال و هاء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

— —	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
— َ —	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
— ُ —	Ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif ح كة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya“ mati ط كة	Ditulis	<i>tansā</i>

3	Kasrah + ya" mati كَرِي	Ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بَيْكِي	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Dammah + wawumati قَوْل	Ditulis	<i>au</i>
		Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

لَأَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَاقَّكَ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

نَقْرُ أ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
انْقِيَابُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti oleh huruf *Syamsiyah* ditulis dengan huruf pertama *Syamsiyah* tersebut.

لا طَبَّءٌ	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
نَاشِصٌ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

ذَوِي فُرُوضٍ	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أُمُّ اَلْاِسْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dankarunia Nya, sholawat serta salam selalu kami haturkan pada baginda Nabi sekaligus Rasul Muhammad SAW makhluk paling mulia disisi-Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Transportasi, dan Pertahanan Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia Tahun 1980-2017”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata I Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan terimakasih yang dalam kepada pihak-pihak yang telah membantupenyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi MA. Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Sunaryati, SE, M.Si., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Muh. Rudi Nugroho, S.E., M.Sc., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu mengarahkan dan membimbing penyusun hingga skripsi ini selesai. Terimakasih atas segala motivasi, semangat, dan ketulusan bapak kepada penyusun.
5. Ibu Anggari Marya Kresnowati, SE., ME., selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihat dan bimbingan selama penyusun menempuh kuliah di Prodi Ekonomi Syariah.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman pengetahuannya kepada penyusun selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua, Bapak Mukhsin dan Ibu Siti Maesaroh sebagai sumber motivasi terbesar dalam hidup penyusun serta dengan tulus memberikan dukungan dan doa sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Suami saya tercinta, Atia Mahmud Hasan Fauzi M.Pd., yang selalu membantu dan menjadi tempat berkeluh kesah dalam menjalani proses penyelesaian tugas akhir ini.

10. Sahabat Gulaku, Meindah, Ida, Naufi, Iis yang menjadi teman saya dari awal menempuh jenjang perkuliahan dan menjadi teman bermain, curhat yang sangat menyenangkan.
11. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah C 2015 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Teman-teman seperjuangan “Sekar Arum” angkatan 2015 Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Keluarga Besar HMI yang telah berhasil mengukir memori-memori indah, baik suka dan duka sekaligus tempat berprosesku, kudoakan selalu jaya dan bahagia.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan tugas akhirserta dalam menempuh studi yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 22 Juli 2019

Penyusun,

Yuyun Aqidah
NIM. 15810115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DARTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
<i>ABSTRACT</i>	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	11

BAB II KERANGKA TEORI.....	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi	14
B. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam	20
C. Produk Domestik Bruto	23
D. Peran dan Campur Tangan Pemerintah dalam Perekonomian.....	26
E. Pengeluaran pemerintah	30
F. Kebijakan Fiskal Menurut Islam.....	39
G. Gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	42
H. Telaah Pustaka	43
I. Pengembangan Hipotesis	47
J. Kerangka Pemikiran.....	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	54
A. Metode Penelitian.....	54
1. Jenis Penelitian.....	54
2. Metode Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Analisis Data Penelitian	63
1. Analisis Deskriptif.....	63
2. Analisis Error Correction Model	75
B. Pembahasan.....	80
1. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan	80
2. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan	82
3. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian	84
4. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Transportasi	85
5. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertahanan	86

BAB V PENUTUP.....88

 A. Kesimpulan88

 B. Keterbatasan Penelitian.....89

 C. Saran90

DAFTAR PUSTAKA.....92

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP XIX



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengeluaran Pemerintah	5
Tabel 4.1 Data Statistik Deskriptif	64
Tabel 4.2 Hasil Uji Akar Unit dan Uji Derajat Integrasi dengan Uji ADF	76
Tabel 4.3 Hasil Uji Kointegrasi	77
Tabel 4.4 Hasil Jangka Panjang	78
Tabel 4.5 Hasil Jangka Pendek	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peningkatan PDB dan Pengeluaran Pemerintah dan Anggaran Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pertanian	2
Gambar 2.1 Grafik Teori Harrod-Domar	17
Gambar 2.2 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner	35
Gambar 2.3 Kurva Perkembangan pengeluaran Pemerintah	37
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran.....	53
Gambar 4.1 Perkembangan PDB Indonesia tahun1980-2017	65
Gambar 4.2 Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan tahun1980-2017.....	67
Gambar 4.3 Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan tahun 1980-2017.....	69
Gambar 4.4 Pengeluaran pemerintah di sektor pertanian tahun 1980-2017	71
Gambar 4.5 Pengeluaran pemerintah di sektor transportasi tahun 1980-2017.....	73
Gambar 4.6 Pengeluaran pemerintah di sektor pertahanan tahun 1980-2017	74

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di beberapa sektor (pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi dan pertahanan) terhadap PDB di Indonesia dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder Indonesia tahun 1980 sampai 2017. Teknik analisis data menggunakan analisis data *time series* dengan model ECM (*Error Correction Model*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang variabel pengeluaran pemerintah atas sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan pertahanan berpengaruh positif signifikan terhadap PDB, namun pada variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi berpengaruh signifikan namun tidak berpengaruh terhadap PDB atau bertanda negatif. Sementara dalam jangka pendek hanya variabel pengeluaran pemerintah atas sektor pendidikan dan pertahanan yang berpengaruh signifikan terhadap PDB, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah atas sektor kesehatan, pertanian dan transportasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB.

Kata kunci : Produk Domestik Bruto, pengeluaran pemerintah, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi, pertahanan, *Error Correction Model*.

ABSTACT

This study aims to determine the effect of government spending in several sectors (education, health, agriculture, transportation and defense) on GDP in Indonesia in the long term and short term. This study uses a quantitative approach. The data in this study used secondary data from Indonesia 1980 to 2017. Data analysis techniques used time series data analysis with the ECM (*Error Correction Model*) model.

The results showed that in the long run the variable government spending on education, health, agriculture and defense had a significant positive effect on GDP, but the variable on government expenditure on transportation had a significant effect but did not affect GDP or was negative. While in the short term only the variable government expenditure on the education and defense sector has a significant effect on GDP, while the variable on government expenditure on the health, agriculture and transportation sectors does not significantly influence the GDP.

Keywords : GDP, government spending, education, health, agriculture, transportation, *defense, Error Correction Model*.

BAB I

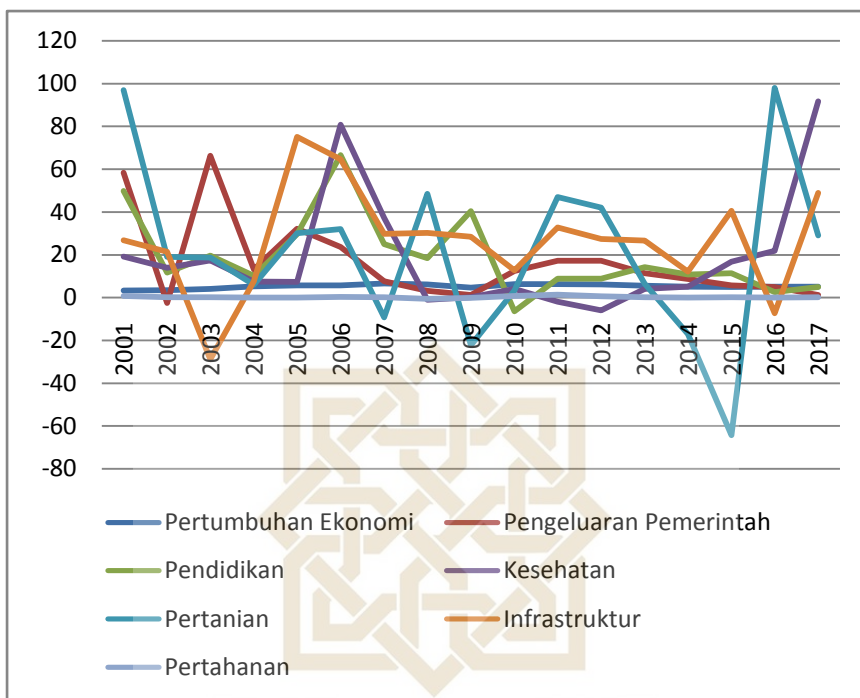
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan perekonomian suatu negara dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara menuju pada keadaan yang lebih baik dari periode ke periode berikutnya. Faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan pembentukan teknologi (Kolluri *et al.*, 2000).

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari produk domestik bruto. Menurut Badan Pusat Statistik, PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Mankiw, 2016).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade terakhir mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi perekonomian dunia. Pendapatan nasional sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi memperlihatkan pertumbuhan yang fluktuatif. Kondisi perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang belum mencapai kondisi *steady state* dimana suatu perekonomian sudah berada dalam keadaan stabil dan tidak mudah terkena goncangan (Bastias, 2010).



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah dan Anggaran Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pertanian

Sumber : Wordbank, Nota Keuangan dan APBN Tahun 2001-2017, diolah.

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa PDB di Indonesia dari tahun 2001 sampai tahun 2017 mengalami fluktuatif karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Pada tahun 2009 PDB mengalami penurunan yang cukup signifikan mencapai nilai 4,63 persen, namun mengalami peningkatan pada tahun 2017 mencapai nilai 5,07 persen. Indonesia

merupakan negara berkembang sehingga belum mencapai kondisi *steady state*.

peningkatan belanja pemerintah lebih didominasi untuk fungsi pelayanan umum. Berdasarkan klasifikasi belanja negara menurut fungsi, belanja negara dibedakan menjadi belanja untuk fungsi pelayanan umum, dan fungsi ekonomi. Anggaran fungsi pelayanan umum tersebut antara lain mencakup: program-program pelayanan umum yang dilakukan oleh kementerian negara atau lembaga, pemberian berbagai jenis subsidi, pembayaran bunga utang, program penataan administrasi kependudukan, program pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, serta program penelitian dan pengembangan iptek. Belanja pada fungsi ekonomi dialokasikan untuk mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pendidikan, kesehatan, pertanian dan Infrastruktur. Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat merupakan layanan publik yang dapat disediakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat (Afiat, 2015).

Pemerintahan melakukan dua kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan kebijakan fiskal

adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran (Anggraeini, 2017).

Menurut Magkoesoebroto (1994), penerimaan pemerintah pada umumnya dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan yang berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri, penerimaan dari badan usaha milik pemerintah, penerimaan dari lelang, dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Teori terkait dengan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli. Hukum yang dikembangkan oleh Rowstow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Sedangkan menurut Peacock dan Wiseman dengan meningkatnya penerimaan menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin banyak. Banyaknya pengeluaran

pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Mangkoesoebroto,1994).

Kualitas sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahwa kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia akan menentukan tingkat produksi. Karena kekayaan yang dimiliki suatu bangsa tidak hanya modal fisik akan tetapi modal sumber daya manusia yang berkualitas sebagai faktor produksi yang penting untuk mencapai berkelanjutan tingkat pertumbuhan ekonomi (Ghali, 1997). Pengeluaran pemerintah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Pengeluaran Pemerintah

Tahun	Proporsi Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Transportasi dan Pertahanan (%)				
	Pendidikan	Kesehatan	Pertanian	Transportasi	Pertahanan
1980	6,08	2,18	2,68	8,68	11,0
1984	9,05	2,24	2,66	8,66	10,36
1989	3,72	0,99	3,68	5,68	6,66
1994	4,40	1,42	4,92	6,92	5,84
1999	3,40	1,83	3,85	3,85	5,59
2004	6,01	2,86	2,20	2,20	5,79
2009	10,40	2,57	3,69	4,79	3,0
2014	20,0	3,30	4,0	2,36	4,40
2017	20,0	5,0	5,0	4,52	5,03

Sumber : Nota Keuangan dan APBN Tahun 1980-2017, diolah.

Berdasarkan tabel proporsi pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi dan pertahanan berubah-ubah. Jumlah proporsi pengeluaran pemerintah paling tinggi pada sektor pendidikan yang pada

tahun 2017 mencapai angka 20 persen, proporsi pengeluaran pemerintah atas pendidikan meningkat seiring pergantian undang-undang, demikian pula sektor transportasi dan pertahanan juga yang tertinggi yang disumbang oleh APBN. Sedangkan paling rendah pada sektor kesehatan pada tahun 2017 hanya mencapai angka 5 persen. Pengeluaran pemerintah atas pertanian masih relatif rendah hanya berkisar 5 persen, hal ini menjadi masalah karena sektor pertanian termasuk penyumbang PDB terbesar di Indonesia.

Pengeluaran Peningkatan pendapatan negara biasanya dengan meningkatkan barang dan jasa yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang mengalami pertumbuhan dalam jumlah dan kualitasnya. Sehingga peran sumberdaya alam, sumber daya manusia, modal, peningkatan teknologi sangat dibutuhkan. Dengan demikian pertumbuhan akan meningkat dan peran pemerintah dapat dikatakan berhasil (Baum, *et al.*, 1993).

Dari berbagai sektor unggulan yang dapat meningkatkan PDB di Indonesia, sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi dan pertahanan merupakan dasar dari pembangunan suatu negara. Kelima sektor tersebut merupakan hal penting dari peningkatan sumber produktivitas. Sehingga perlu adanya pengoptimalan dari pemerintah untuk kelima sektor tersebut.

Pendidikan dan kesehatan merupakan modal awal untuk membentuk sumber daya manusia lebih berkualitas. Pada

dasarnya sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga kualitas dan kuantitas sumber tenaga kerja menentukan jumlah produksi(Bose *et al.*, 2007)

Tersedianya infrastruktur dapat membantu perbaikan kualitas sumber daya manusia dengan menunjang investasi. Dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat pemerintah menyediakan barang publik seperti jalan, perumahan, dan transportasi. Adanya ketersediaan barang publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan mendukung peningkatan produktifitas sumber daya manusia. Ketersediaan rumah yang layak akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari akan tercapai. Jaringan transportasi dan jalan akan mempermudah distribusi kegiatan ekonomi dalam jangka panjang sehingga akan menjadikan kesetaraan pendapatan (Bank *et al.*, 1995).

Indonesia sebagai negara agraris, sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian yang mendominasi di kalangan masyarakat. Luas lahan di Indonesia dengan kondisi tanahnya yang subur akan mendukung masyarakatnya untuk bertani untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut bisa kita lihat jelas dari peranan sektor pertanian dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja pada masyarakat. Pembangunan pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih baik, sekalipun prioritas pada kebijakan industrilisasi sudah dijatuhkan, namun sektor pertanian dapat memiliki kemampuan dalam menghasilkan surplus.

pengeluaran pemerintah atas sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, pertanian, dan pertahanan merupakan suatu jalan untuk investasi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Efek dari setiap pembangunan pada kelima sektor tersebut tidak dapat langsung dirasakan secara langsung namun butuh beberapa periode untuk merasakan dampaknya. Untuk mengetahui dampaknya dibutuhkan penelitian tentang pengeluaran pemerintah dalam jangka waktu yang panjang (*time series*). Dalam penelitian dengan runtun waktu yang panjang menggunakan model regresi *Error Corection Model* (ECM) dapat membantu untuk melihat pengaruh atau dampak dari pemerintah mengeluarkan anggarannya terhadap sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pertahanan pertanian dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dari hasil analisis pemerintah dapat mengambil kebijakan yang akan diterapkan.

Penelitian sebelumnya masih tidak konsisten antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Pada penelitian (Bastias, 2010) dengan judul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009 dengan hasil penelitian bahwa dalam jangka pendek hanya variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam jangka panjang variabel pengeluaran pemerintah atas perumahan dan transportasi

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan bertanda positif, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh (Cheng & Lai, 1997) dengan judul *Government Expenditures and Economics Growth : The Nigerian Experience* dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pada sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari paparan diatas, bahwa salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kebijakan fiskal. Kebijakan tersebut diupayakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, pertanian, dan pertahanan merupakan tujuan pemerintah untuk memacu kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Analisis Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Transportasi, dan Pertahanan Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia periode tahun 1980-2017”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap PDB di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap PDB di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian terhadap PDB di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor transportasi terhadap PDB di Indonesia ?
5. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertahanan terhadap PDB di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap PDB di Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap PDB di Indonesia
3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian terhadap PDB di Indonesia
4. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor transportasi terhadap PDB di Indonesia
5. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertahanan terhadap PDB di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang menyangkut APBN.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah atas fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bagian. Sistematika pembahasan ini memberikan gambaran dan logika berpikir dalam penelitian. Masing-masing uraian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab I akan dipaparkan mengenai gambaran fenomena dan permasalahan yang melandasi penelitian ini. Gambaran tersebut akan didukung dengan data, teori, serta penelitian sebelumnya.

Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis berisi tentang definisi, konsep, serta berbagai hal yang terkait

dengan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian dan bersumber dari buku, artikel maupun jurnal. Pada bagian ini juga dipaparkan tentang teori yang melandasi hubungan antar variabel kemudian dihubungkan dengan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu ada pengembangan hipotesis serta kerangka pemikiran yang menjadi dasar topik yang diteliti oleh penyusun.

Bab III Metode penelitian berisi tentang diskripsi penelitian ini dilakukan dan menjelaskan setiap variabel penelitian. Pada bagian ini juga menjelaskan tentang obyek penelitian seperti sumber data, jenis penelitian hingga alat analisis yang digunakan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang hasil perhitungan olahan data serta interpretasi terkait hasil perhitungan tersebut. Bab ini juga merupakan jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan atas hasil pembahasan serta jawaban atas pertanyaan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini. Peneliti juga akan menyampaikan kekurangan dalam melakukan penelitian ini sebagai bahan analisis di masa mendatang.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan perekonomian suatu negara yang bernilai barang dan jasa yang diproduksi pada suatu tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur sebagai peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB), begitu juga untuk tingkat regional (daerah) dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan menghitung menurut harga tetap, pendapatan nasional riil yang dihitung dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan produksi barang dan jasa yang berlaku dalam perekonomian (Sandono Sukirno, 2006 : 9).

Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi disuatu negara dianggap sangat penting. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu seksama periode waktu tertentu. Ada dua cara untuk mengetahui PDB pertama, dengan melihat PDB sebagai pendapatan total dari setiap orang didalam perekonomian. Kedua, sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian (Mankiw, 2006:17).

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dapat diukur dari kenaikan barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun akan tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat (Sandono Sukirno, 2006:10).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Adam Smith

Menurut Adam Smith (Todaro, 2010 : 22), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Terdapat tiga unsur pokok dari sistem produksi suatu negara, yaitu :

- 1) Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.
- 2) Sumber daya manusia (jumlah penduduk) mempunyai peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.

3) Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

Adapun laju pertumbuhan ekonomi dalam konteks ini melibatkan PDB, sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Teori pertumbuhan klasik, pertumbuhan ekonomi akan bergantung pada faktor produksi seperti berikut :

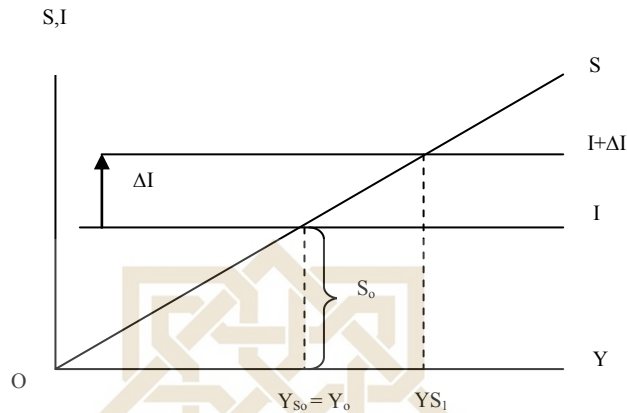
Persamaan $\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$

- ΔY : tingkat pertumbuhan ekonomi
- ΔK : tingkat pertambahan barang modal
- ΔL : tingkat pertambahan tenaga
- ΔT : tingkat pertambahan teknologi

b. Teori pertumbuhan Harrod-Domar

Menurut teori Harrod-Domar menganggap dalam perekonomian pada dasarnya menabung atau menyisihkan sebagian dari beberapa pendapatan untuk sekedar mengganti barang-barang modal yang habis atau yang rusak. Akan tetapi untuk memacu pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya investasi yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan arus output nasional atau GDP. Karena semakin banyak yang ditabungkan dan kemudian diinvestasikan maka laju pertumbuhan akan semakin cepat (Todaro dan Smith, 2011:136).

Harrod-Domar juga mengemukakan bahwa investasi atau penanaman modal yang dilakukan masyarakat dalam suatu waktu tertentu digunakan untuk dua tujuan yaitu, untuk mengganti barang-barang modal yang tidak dapat digunakan lagi dan untuk memperbesar jumlah barang-barang modal yang tersedia dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dalam memperbandingkan jumlah pertambahan produksi dengan penanaman modal yang dilakukan akan diperoleh dua macam nilai. Nilai yang pertama adalah perbandingan antara seluruh tambahan produksi yang diciptakan dalam satu tahun tertentu oleh sejumlah penanaman modal, dengan jumlah modal yang ditanamkan. Nilai yang kedua merupakan perbandingan antara jumlah pertambahan produksi dengan penanaman modal yang dilakukan. Nilai tersebut menunjukkan pertambahan efektif kapasitas memproduksi suatu negara dalam satu tahun tertentu (Sandono Sukirno, 2006:257-258).



Gambar 2.1 Grafik Teori Harrod-Domar

Sumber : Sandono Sukirno, 2006 : 261

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi Rostow

Musgrave (Musgrave, 1989) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial.

Ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa :

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Investasi produktif yang bersifat langsung harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi infrastruktur” ekonomi dan sosial. Contohnya adalah pembangunan jalan-jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi dan sebagainya, yang kesemuanya itu mutlak dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif.

Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Pendidikan formal, program pendidikan dan pelatihan kerja perlu lebih diefektifkan untuk mencetak tenaga-tenaga terdidik dan sumber daya manusia yang terampil. Logika konsep investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dan penciptaan modal manusia (human capital) dapat dianalogikan dengan peningkatan

kualitas dan produktifitas sumber daya tanah melalui investasi strategis.

2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.
3. Kemajuan teknologi, terdapat tiga klasifikasi yaitu:
 - 1) Kemajuan teknologi yang bersifat netral
 - 2) Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja
 - 3) Kemajuan teknologi yang hemat modal

d. Teori Pertumbuhan Ekonomi Sollow

Teori yang dikembangkan oleh Abramovits dan Sollow melihat dari sudut pandang penawaran. Pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi tergantung pertumbuhan modal, penduduk dan teknologi. Solow mengemukakan bahwa faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran

tenaga kerja (Sukirno, 2013 : 437). Jika teori Sollow di terapkan di Indonesia, maka teori menyatakan bahwa pertumbuhan tenaga kerja bukanlah yang terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi tetapi kemahiran dan kepakaran tenaga. Kemahiran dan kepakaran tenaga kerja ini yang dapat disebut sebagai kualitas SDM. Sehingga agar pertumbuhan ekonomi terwujud, pemerintah harus lebih giat dalam meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki.

B. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran Islam. Pertumbuhan ekonomi telah ada dalam wacana pemikiran muslim klasik, yang dibahas dalam “*pemakmuran bumi*” yang merupakan pemahaman dari firman Allah dalam Al-quran surat Al-Hud ayat 61:

أَشْلَعْنِي ۖ الْأَرْضَ طَرَعٌ رَّحْمَتِي بَقِيَّةً مَّعْرُوثِي
تُبُّ إِلَهِي ۚ

Artinya : “*Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya*”².

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt menjadikan kita sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Terminologi

² Q.S. Al-Hud Ayat 61

pemakmuran bumi ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir : “Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur” (Tariqi, 2004:282-283).

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia (Sadeq, 1991:5-6). Pada dasarnya Islam mengajarkan kepada umatnya agar semata-mata mengejar kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam harus seimbang.

Menurut (Tariqi, 2004: 301-322), adapun Islam mempunyai karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai, yaitu :

- 1) Komprehensif (*Al-syumul*), Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih baik dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan

sosial. pertumbuhan harus berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kesejahteraan duniawi tetapi juga akhirat.

- 2) Berimbang (*Tawazun*), pertumbuhan tidak hanya berorientasi untuk menciptakan pertambahan produksi, namun ditunjukkan berlandaskan asas keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-maidah ayat 8 :

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰى

Artinya : “ *berbuat adillah kamu, sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketakwaan*”³.

- 3) Realistis (*Waqi'iyah*), realistis adalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai dengan kenyataan. Dalam teori-teori sosial secara umum, realistis merupakan persyaratan yang harus ada didalamnya. Karena teori yang utopis yang jauh dari kondisi riil akan sulit diterima oleh masyarakat. Islam yang merupakan agama dari Allah tidak mungkin menetapkan aturan-aturan idealis yang jauh dari kehidupan manusia dan kemungkinan penerapannya.
- 4) Keadilan (*'Adalah*), pertumbuhan harus disertai dengan adanya keadilan distributif. Dari realitas yang ada kita

³Q.S. Al-Maidah Ayat 8

bisa melihat betapa kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, maka suatu negara harus disertai kebijakan dengan pemerataan yang adil.

- 5) Bertanggung Jawab (*Mas'uliyah*), ketika Islam memberikan ruang kebebasan terhadap individu dalam bidang apapun, namun dalam islam kebebasan itu dibatasi oleh berbagai aturan yang menunjukkan adanya jaminan kebahagiaan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan aspek sustainable.
- 6) Mencukupi (*Kifayah*), para ahli fikih telah menetapkan dalam bidang pengalokasian harta dengan ukuran yang dapat mencukupi kebutuhan berupa pangan, sandang dan papan dalam batas yang seharusnya.
- 7) Berfokus pada manusia (*Ghayatuha al-insani*), didalam islam tidak hanya pembangunan fisik saja namun menitikberatkan pada pembangunan sumberdaya manusia. Fungsi utama islam adalah membimbing manusia pada jalur yang baik dengan membangun umat manusia secara keseluruhan.

C. Produk Domestik Bruto (PDB)

a. Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk domestik bruto (PDB) merupakan nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. jadi tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam

suatu nilai uang tertentu sela periode waktu tertentu (Mankiw, 2006:19).

b. Metode Perhitungan PDB

Menurut (Dumairy, 1996:38) Produk Domestik Bruto (PDB) dapat dihitung atau diukur dengan tiga macam pendekatan yaitu :

1) Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Unit-unit produksi dimaksud oleh garis besar dipilah-pilah dibagi menjadi sebelas sektor atau lapangan usaha , yaitu : pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik gas dan air minum, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuanganlainya, sewa rumah, pemerintahan, dan jasa-jasa. Dengan demikian, PDB menurut pendekatan produksi ini adalah penjumlahan dari masing-masing barang dan jasa dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan. Rumus perhitungan PDB pendekatan produksi adalah:

$$Y = (PXQ)_1 + (PXQ)_2 + \dots (PXQ)_n$$

Keterangan =

Y : Pendapatan nasional

P : Harga

Q : Kuantitas

2) Pendekatan Pendapatan

PDB dalam pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi diwilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Balas jasa produksi dimaksud meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya dihitung sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB juga mencakup penyusutan dan pajak-pajak tak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan persektor disebut nilai tambah bruto sektoral. Oleh sebab itu PDB menurut pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan dari nilai tambahan bruto seluruh sektor atau lapangan usaha. Rumus perhitungan PDB pendekatan pendapatan adalah:

$$Y = w + i + r + \pi$$

Keterangan =

Y : Pendapatan nasional

w : upah

i : bunga netto

r : sewa

π : keuntungan

3) Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi: pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan, pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok, pengeluaran konsumsi pemerintah, ekspor neto dalam jangka setahun. Rumus umum untuk menghitung PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y : Pendapatan Nasional

C : Konsumsi

G : Pengeluaran pemerintah

X : Ekspor

M : Impor

D. Peran dan Campur Tangan Pemerintah dalam Perekonomian

a. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran dalam kehidupan bernegara yang dapat diklasifikasikan menjadi empat macam kelompok peran (Dumairy, 1996:56) yaitu :

- 1) Peran alokatif, merupakan peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar manfaatnya bisa optimal dan mendukung efisiensi

produksi. Kegagalan pasar dan eksternalitas mengundang pemerintah untuk turut campur tangan dalam perekonomian. Pemerintah harus merencanakan peruntukan dan mengatur penggunaan sumber daya ekonomi yang ada agar terelokasi secara efisiensi. Peran alokatif ini tidak cukup sekedar melibatkan pemerintah selaku pelindung masyarakat, tapi juga menuntut pengeluaran biaya. Keterlibatan peran dan pengeluaran pemerintah biasanya cukup besar di negara-negara sedang berkembang karena pemerintah bertindak pula selaku pelopor dan pengendalian pembangunan.

- 2) Peran distributif, merupakan peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil ekonomi secara adil dan wajar. Kesenjangan pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi akan cenderung mengkonsentrasikan kekuatan dan kekuasaan ekonomi ditangan segelintir pihak (lapisan masyarakat, wilayah, sektor) tertentu. dalam hal konsentrasi kekuatan dan kekuasaan tadi berdimensi antar lapisan masyarakat, segmen-segmen tertentu dalam perekonomian mengarah ke struktur pasar yang oligopolistik dan bahkan monopolistik. Peran distributif pemerintah dapat ditempuh baik melalui jalur penerimaan mengenakan pajak dan memungut sumber-sumber pendapatan lainnya untuk kemudian didistribusikan

secara adil proporsional. Dengan pola serupa pula pemerintah membelanjakan pengeluarannya.

- 3) Peran stabilisatif, merupakan peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Isu stabilisasi merupakan alasan lain bagi pemerintah untuk turut mencampuri perekonomian. Alasan ini bertolak dari kenyataan objektif sering tidak berdayanya pihak swasta mengatasi sejumlah masalah yang timbul, bahkan sering tidak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ketidak mampuan swasta dalam mengatasi masalah pada umumnya bersifat objektif sehingga mengundang campur tangan pemerintah. Namun kadangkala ketidak berdayaan pihak swasta itu justru diciptakan sendiri secara subjektif oleh pemerintah, dalam artian pemerintah secara apriori berpandangan pihak swasta tidak mungkin mampumengatasi masalah.
- 4) Peran Dinamisatif, merupakan peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju. Argumen pemerintah bahwa harus berperan sebagai dinamisor didukung pula oleh sebuah premis yang dicanangkan dan dikampayekan sendiri. Karena pemerintah yang merencanakan dan memodali pembangunan, maka pemerintah merasa paling bertanggung jawab atas

pelaksanaannya atas dasar itu pemerintah merasa berhak melakukan apa saja yang menurutnya pantas ditempuh demi pembangunan. Pemerintah boleh mengambil alih kegiatan yang semula dijalankan oleh swasta. Keempat macam peranan pemerintah tadi potensi menimbulkan kesulitan penyerasian atau bahkan pertentangan kebijaksanaan. Sebagai contoh dalam kapasitas contoh dalam kapasitas selaku stabilisator, pemerintah harus mengendalikan inflasi. Apabila hal itu ditempuh dengan cara mengurangi pengeluarannya, agar permintaan agregat terkendali sehingga tidak menambah memicu kenaikan harga-harga, maka porsi pengeluaran pemerintah untuk lapisan masyarakat atau sektor yang harus dibantu dapat turut dikurangi. Padahal justru dengan pengeluaran itulah pemerintah menjalankan peran distributifnya.

b. Kebijakan Pemerintah

Dalam Anggraeni (2017), Ada tiga bentuk kebijakan yang diterapkan di Indonesia, yaitu :

- 1) Kebijakan moneter, merupakan kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kebijaksanaan ini mengacu pada keseimbangan dinamis antara JUB dengan barang dan jasa dalam masyarakat.

- 2) Kebijakan fiskal, merupakan kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) uang oleh pemerintah. Dalam masa inflasi biasanya kebijakan fiskal akan berbentuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Sebaliknya apabila pengangguran serius maka pemerintah berusaha menambah pengeluaran dan berusaha mengurangi pajak.
- 3) Kebijaksanaan internasional, merupakan kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan perdagangan dan pembayaran internasionalnya. Kebijakan ini berkaitan dengan neraca perdagangan dan pembayaran surplus dan defisit. Juga berhubungan dengan kebijakan menerima atau memberikan bantuan luar negeri.

E. Pengeluaran pemerintah

a. Teori Pengeluaran pemerintah

Dalam buku Marzuki Ilyas (1989: 38) pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dasar teori pengeluaran pemerintah adalah dari identitas keseimbangan pendapatan nasional, yaitu : $Y = C + I + G + (X-M)$ yang merupakan sumber legitimasi

pandangan kaum Keynesian akan relevansi campuran pemerintah dalam perekonomian. Peningkatan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi pendapatan nasional. Dalam mengalokasikan pengeluaran, pemerintah harus melakukan banyak pertimbangan, karena pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi harus mempertimbangkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Meningkatkan pengeluaran pemerintah bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus memperhitungkan siapa saja yang akan meningkat pendapatannya. Pemerintah juga perlu menghindari agar peningkatan peran dalam perekonomian tidak melemahkan pihak swasta (Dumairy, 1996:161).

Pemerintah berperan penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah dalam pengambilan kebijakan harus mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat. terdapat anggaran yang digunakan untuk memprioritaskan yang dialokasikan untuk sektor-sektor yang menyangkut kebutuhan masyarakat, kebijakan pemerintah itu ada sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan sosial adalah

beberapa contoh diantaranya yang perlu diperhatikan lebih, hal ini dikarenakan sektor-sektor tersebutlah, masyarakat dapat merasakan secara langsung dampak dari kebijakan pemerintah yang diambil.

b. Teori Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro

Menurut Mangkosoebroto (1994:177-178) pengeluaran pemerintah secara mikro dimaksudkan untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan pihak swasta dan sebagai akibat adanya kegagalan pasar. Secara mikroekonomi teori perkembangan pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara penawaran dan permintaan untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Pengeluaran pemerintah untuk barang publik akan menstimulasi pengeluaran untuk barang lain. Perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi faktor-faktor di bawah ini:

- 1) Perubahan permintaan akan barang publik
- 2) Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

- 3) Perubahan kualitas barang publik
- 4) Perubahan harga faktor- faktor produksi

c. Teori Pengeluaran Pemerintah Secara Makro

Menurut (Mangkoesebroto, 1995:169-176) perkembangan teori makro oleh para ahli mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi tiga golongan :

- 1) Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah lebih besar dari total investasi sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana prasarana publik, misalnya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan karena perkembangan ekonomi.

Teori Rostow dan Musgrave merupakan suatu pandangan yang muncul dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain itu tidak jelas, apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap, ataukah beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

2) Hukum Warger

Wagner mengemukakan pendapatnya dalam suatu bentuk hukum, yaitu sebagai berikut: apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik.

Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Hukum tersebut dapat diformulasikan dengan notasi :

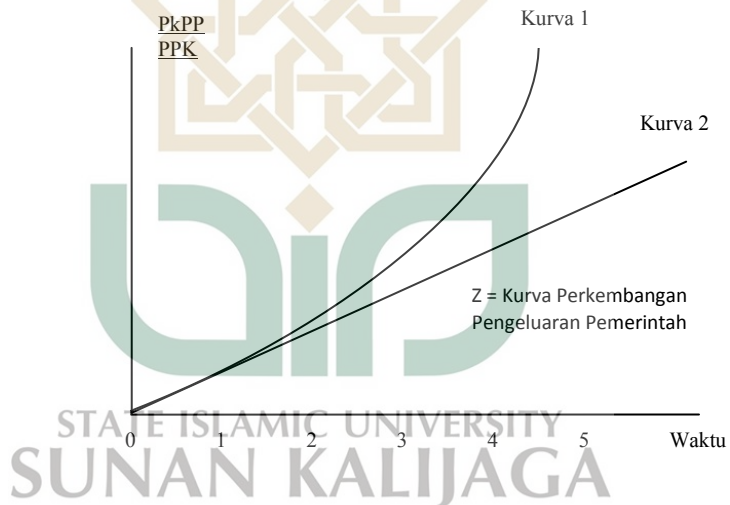
$$\frac{P_k PP_1}{PPK_1 PPK_2} < \frac{P_k PP_2}{PPK_2 PPK_3} < \dots < \frac{P_k PP_n}{PPK_n PPK_{n+1}}$$

Keterangan :

PkPP = Pengeluaran pemerintah perkapita

PPK = Pendapatan perkapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2, ..., n = Jangka waktu (tahun)



Gambar 2.2 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner

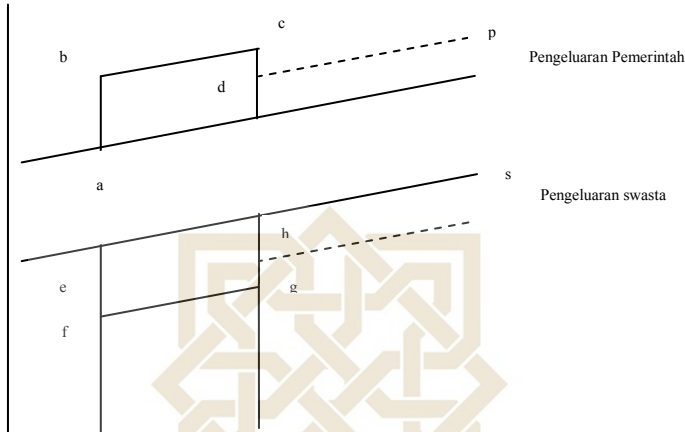
Sumber : Mangkoesoebroto,2001

3) Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku

perkembangan pengeluaran pemerintah. Pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai anggarannya. Di sisi lain masyarakat memiliki keengganan untuk membayar pajak, terlebih lagi jika pajak terus dinaikkan. Mempertimbangkan teori pemungutan suara dimana masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran pajak. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GDP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Akibat adanya keadaan tertentu yang mengharuskan pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif untuk peningkatan penerimaan negara. Jika tarif pajak dinaikkan maka pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

Pengeluaran
Pemerintah / GDP



Gambar 2.3 Kurva Perkembangan pengeluaran Pemerintah

Sumber : Mangkoesoebroto, 2001

Pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh beberapa teroti yaitu model pembangunan, hukum Wagner, teori Peacock dan Wiseman. Model pembangunan menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sebagai investasi pemerintah dapat meningkatkan pembangunan ekonomi baik dalam tahap awal, menengah maupun akhir. Hukum Wagner berisi teori bahwa pendapatan per kapita yang semakin meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah meningkat. Selain itu, Teori Peacock dan Wiseman juga mengungkapkan bahwa dalam keadaan normal, meningkatnya GDP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu

juga dengan pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi GDP serta pertumbuhan ekonomi suatu negara.

d. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Menurut (Suparmoko, 2012: 57) pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi, sehingga dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran yang *self liquidating* sebagian atau sepenuhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa/barang-barang yang bersangkutan. Misalnya, pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.
- 2) Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya, pengeluaran untuk bidang pertanian, pendidikan, dan pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

- 3) Pengeluaran yang tidak *self liquidating* maupun yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, untuk bidang rekreasi, objek-objek pariwisata dan sebagainya.
- 4) Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat

F. Kebijakan Fiskal dalam Islam

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur permasalahan ibadah dan muamalah, akan tetapi mencakup semua aspek termasuk masalah negara dan pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan Islam organisasi mendapat perhatian utama. Al-Mawardi seorang pemikir termuka abad ke-5 berpendapat bahwa pelaksanaan *imamah* (kepemimpinan politik keagamaan) merupakan kekuasaan absolut dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharannya agama dan pengelolaan dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, negara memiliki peran aktif demi terealisasinya tujuan material dan spiritual. Dalam Islam, terpenuhinya pekerjaan dan kepentingan publik bagi masyarakat merupakan kewajiban keagamaan dan dan moral penguasa. Tegaknya suatu negara bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan dan

mendistribusikannya pada kolektif masyarakat (Rahmawati:2016).

Dalam Islam, kebijakan negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta ditengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi uang publik dipandang sebagai amanah ditangan penguasa dan harus diarahkan pertama-tama pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin, sehingga tercipta keamanan ,masyarakat dan kesejahteraan umum (Rahmawati:2016).

Dalam Umer Chapra (2011:288) terkait kebijakan pengeluaran pemerintah pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dai Al-Quran dan As-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantaranya adalah:

1. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor *maslahah*.

2. Menghindari *mashaqqah* (kesulitan) dan *mudjarrat* harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
3. Kaidah *al-ghiurm bi al-gunmy*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian).
4. Kaidah *ma la yatimm al-wajib*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya”.

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian , yaitu:

1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaan lainnya.

Adapun kaidah yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah

disebutkan diatas. Secara rinci pembelanjaan pemerintah harus didasarkan pada:

1. Prinsip efisien dalam belanja rutin, yaitu mendapat sebanyak mungkin manfaat dengan biaya sedikit mungkin. Dengan demikian, akan jauh dari sifat mubazir dan kikir disamping alokasinya harus sesuai syariah.
2. Prinsip keadilan, yaitu tidak hanya berpihak pada orang kaya saja dalam pembelanjaan.
3. Prinsip komitmen pada syariah dengan skala prioritas dari yang wajib, sunnah, mubah atau *darurah*, *hajiyyah* dan *kamaliyyah*.

G. Gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan suatu alat pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan sebagai alat pengelola perekonomian negara. Sejak Indonesia merdeka telah dilakukan upaya untuk mulai menyusun pengelolaan keuangan negara. Di mulai sejak tahun 1950-an dirumuskan APBN, namun saat itu fungsinya hanya sebagai perhitungan sementara untuk memberikan patokan sebagai dasar pembuatan APBN di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1960 APBN menganut sistem berimbang dan dinamis yang menggantikan APBN dengan sistem Moneter pada jaman Orde Lama. APBN berimbang

dan dinamis terdiri dari anggaran penerimaan dan anggaran belanja. Pada sisi penerimaan dicatat penerimaan dari dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri (pinjaman), sedangkan sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Selama masa krisis, APBN dalam periode 1998/1999-2000 menghadapi tekanan yang cukup berat akibat membengkaknya beban pengeluaran negara serta menyusutnya penerimaan negara. Kemudian muncul peraturan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian penyusunan APBN Tahun Anggaran 2001 selain mengikuti standar internasional juga diselaraskan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut. Pada tahun 2005 pemerintah melakukan kebijakan perubahan format belanja negara. Perubahan format belanja negara tersebut dilandasi oleh Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perubahan yang dimaksud adalah dengan menjalankan sistem penganggaran yang terpadu (*unified budgeting system*), yaitu dengan menyatukan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang sebelumnya dipisahkan (Purwanto, 2006).

H. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang menganalisis mengenai pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi, dan pertahanan terhadap PDB telah banyak dilakukan dengan hasil yang beragam. pemilihan skripsi dan jurnal penelitian sebelumnya didasari oleh

kesamaan variabel dependen maupun independen, tujuan penelitian, metode analisis, serta hasil penelitian yang akan dilakukan sebagai acuan-acuan penelitian sebelumnya.

Penelitian dengan judul “*Government Expenditure And Economic Growth In Nigeria, 1970-2008 : A Disaggregated Analysis*” yang dilakukan oleh Abu Nurudeen*, Abdullahi Usman (2012) dengan menggunakan Regresi *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja modal, pengeluaran berulang dan, pengeluaran pada sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan pemerintah kurang dalam mengelola keuangan, sebaliknya pada variabel transportasi/infrastruktur dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian dengan judul “*Growth Effects of Public Expenditure on the State and Local Level: Evidence From a Sample of Rich Government*” yang dilakukan oleh Antonio Estache (2007). Hubungan negatif yang kuat antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Namun hubungan negatif tersebut hanya dapat diterapkan untuk Negara kaya dengan sektor publik yang luas. Sedangkan Negara sedang berkembang lebih berorientasi mengembangkan ukuran pemerintah untuk perlindungan hak kepemilikan dan mengadakan hubungan kerjasama dengan Negara lain.

Penelitian dengan judul “*The Differential Effects on Economic Growth of Government Expenditures on Education*”

yang dilakukan oleh Welfare and Defense, Donald N dan Shuanglin (1993). Tingkat pertumbuhan pengeluaran pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada semua kasus. Tingkat pertumbuhan pengeluaran kesejahteraan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada satu kasus tetapi tidak signifikan pada semua kasus. Tingkat pertumbuhan pertahanan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada satu subset Negara-negara tertentu tetapi signifikan untuk negara lainnya.

Penelitian dengan judul “*Government Expenditures and Economics Growth : The Nigerian Experience*” yang dilakukan oleh Robinson Monday Olulu, Eravwoke Kester Erhieyovwe and Ukavwe. Dengan hasil penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pada sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang berjudul “Analisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah di sektor Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 1970-2015” yang dilakukan oleh Marlin Anggraeni (2017), dengan menggunakan regresi ECM. Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian secara simultan berpengaruh baik terhadap PDB dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009” yang dilakukan oleh Desi Dwi Bastia (2010), dengan regresi ECM. Hasil dari penelitian tersebut bahwa dalam jangka pendek hanya variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam jangka panjang variabel pengeluaran pemerintah atas perumahan dan transportasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan bertanda positif, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Utami (2006) dengan judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1975-2004”. Data yang diteliti bersifat *time series* yang dianalisis menggunakan *Error Correction Model* (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek variabel pengeluaran rutin pemerintah mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengeluaran pembangunan pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Persamaan terletak pada variabel yang digunakan yaitu pengeluaran

pemerintah. Selain itu jenis penelitian ini sama-sama memiliki data *time series* dan analisisnya menggunakan *Eviews*.

Penelitian yang dilakukan oleh Menik Fitriani Safari (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Ekspor, Pembentukan Modal, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Data yang diteliti bersifat *time series* yang dianalisis menggunakan *Error Correction Model* (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap PDB sebesar 0,15% dalam jangka panjang dan sebesar 0,10% dalam jangka pendek. Persamaan terletak pada alat analisis yang digunakan yaitu *Error Correction Model* (ECM). Perbedaan terletak pada subyek, waktu dan tempat penelitian.

I. Pengembangan Hipotesis

Uraian teoritik yang diharapkan dapat membantu penelitian ini pada gilirannya memberikan pemikiran yang bersifat konseptual. Salah satu diantaranya adalah memberikan gambaran kesimpulan sementara pada penelitian ini yang disebut dengan hipotesis. Penelitian ini setidaknya memiliki empat hipotesis. Kelimanya sebagaimana dipaparkan di bawah ini :

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di sektor pendidikan Terhadap PDB

Dalam teori Todaro dan Smith (2013) manusia sebagai *human capital* peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan

pembangunan suatu negara. Teori *human capital* menyatakan bahwa pendidikan dalam jangka panjang merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi, karena semakin tinggi pendidikan masyarakat semakin tinggi pula tingkat produktivitas masyarakat tersebut. Sedangkan dalam jangka pendek menurut teori *human capital* pendidikan memberikan dalam bentuk pengetahuan, gagasan (ide), kreativitas, ketrampilan dan produktivitas kerja.

H1: Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh positif signifikan terhadap PDB

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di sektor Kesehatan Terhadap PDB

Dalam teori Todaro dan Smith (2013) Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Terkait dengan teori *human capital* bahwa kesehatan dalam jangka panjang berperan signifikan, semakin sehat manusia maka semakin tinggi produktivitasnya. Sedangkan dalam jangka pendek dalam teori *human capital* negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Sarana kesehatan

dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

Maka dari itu, semakin tinggi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan semakin baik sarana prasarana dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Maka akan berimplikasi pada kesehatan masyarakat yang semakin membaik sehingga manusia dapat bekerja optimal sebagai *human capital*. Kemampuan yang optimal akan berpengaruh terhadap kinerjanya dalam mendorong kegiatan perekonomian dan mampu meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara.

H1: Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh positif signifikan terhadap PDB

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di sektor Pertanian Terhadap PDB

Dalam Anggraeni (2017) Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki daratan yang sangat luas sehingga Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. Dimana ekonomi dalam negerinya masih di dominasi oleh ekonomi pedesaan sebagian besar dari jumlah penduduknya atau jumlah tenaga kerjanya bekerja di pertanian. Agar sektor pertanian dapat terus memberikan peran pada perekonomian Indonesia, diperlukan adanya suatu dorongan investasi di sektor pertanian. Dengan adanya pengeluaran pemerintah di sektor pertanian

diharapkan akan memicu kenaikan output yang akan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, serta mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia.

Menurut teori Sukirno (2006), pengertian produksi adalah sesuatu yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan. Tingkat produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor alamiah yang menyebabkan perubahan pada tingkat produksi. Dalam jangka panjang maupun jangka pendek permintaan terhadap barang pertanian bersifat tidak elastis. Ketika penawaran dan permintaan seimbang maka akan mempengaruhi pendapatan dan penggunaan tenaga kerja dalam menghasilkan produksi dalam sektor pertanian. Semakin tinggi produksi pertanian semakin tinggi pendapatan.

H1 : Pengeluaran Pemerintah sektor pertanian dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh positif signifikan terhadap PDB

4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Transportasi Terhadap PDB

Dalam Deni Friawan (2008), transportasi sebagai dasar pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi, sehingga transportasi merupakan suatu kegiatan yang berupa penyelenggaraan

mobilitas manusia, barang dan jasa. Kebutuhan akan transportasi dapat meningkatkan produksi, volume produksi, peningkatan mobilitas kegiatan perekonomian. Sedangkan teori Menurut Sukirno (2006), pengertian produksi adalah sesuatu yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan. Dalam jangka pendek transportasi berpengaruh terhadap peningkatan PDB, ketika transportasi baik di suatu negara tidak akan ada permasalahan pada biaya logistik yang menyebabkan perbedaan harga yang substansial di antara provinsi di Indonesia. Sedangkan dalam jangka panjang infrastruktur dalam transportasi memadai mempengaruhi daya tarik investasi di Indonesia.

H1: Pengeluaran pemerintah sektor transportasi dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh positif signifikan terhadap PDB

5. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di sektor Pertahanan Terhadap PDB

Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, Indonesia memiliki modalitas yang potensial dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Ketika produk produk Alutsista buatan Indonesia memiliki kualitas dan kemampuan yang handal dalam menjaga pertahanan negara maka investasi yang akan masuk

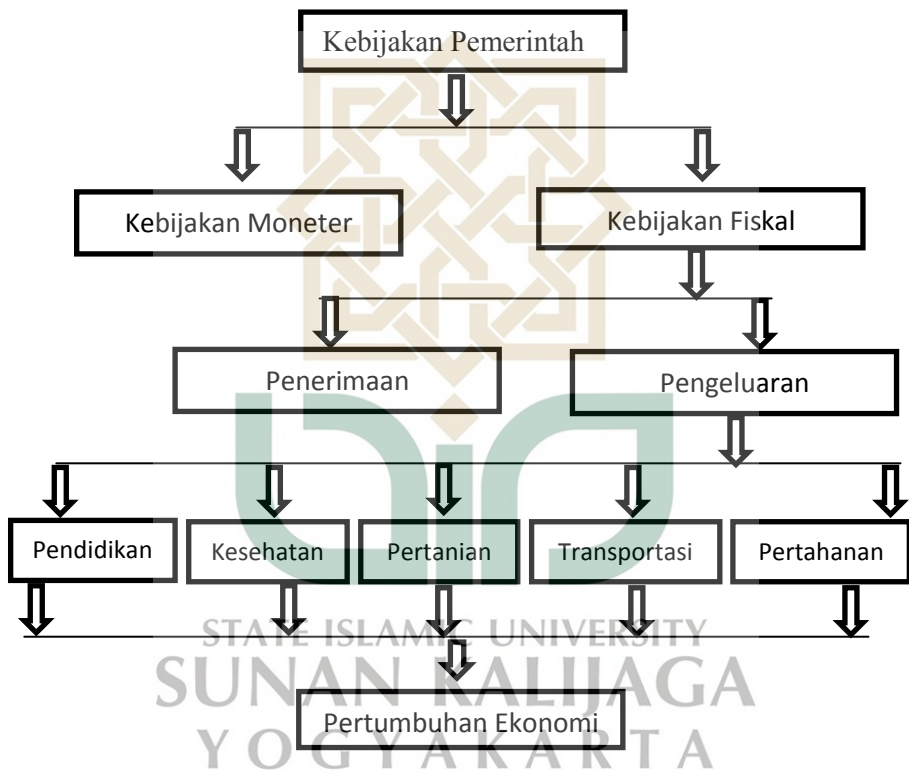
mengalami peningkatan. Ketika tingkat keamanan meningkat maka kesejahteraan masyarakat meningkat. Dalam teori Menurut Sukirno (2006), pengertian produksi adalah sesuatu yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan. Dalam jangka pendek sektor pertahanan berpengaruh dalam meningkatkan PDB, karena ketika negara mampu memproduksi sistem senjata sendiri maka tidak akan ketergantungan senjata luar negeri sehingga mengurangi impor senjata. Sedangkan dalam jangka panjang dapat berkomitmen melakukan investasi ke sektor industri pertahanan.

H1 : Pengeluaran Pemerintah sektor pertahanan dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh positif signifikan terhadap PDB

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

J. Kerangka Pikiran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di telaah pustaka, rumusan masalah dan landasan teori, berikut disusun kerangka pemikiran dari peneliti ini:



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yaitu pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi (Kuncoro, 2011:4). Berdasarkan tujuannya penelitian kuantitatif adalah yang menekankan pada analisis data-data dan penjelasan tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini berupa angka-angka yang diolah dengan metode *Error Correction Model* (ECM), adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

1.) Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data, penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan). Sedangkan berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk

mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014:6). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data *time series* dengan jumlah periode sebanyak 37 tahun.

2) Variabel penelitian

a. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Penelitian ini menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat. Variabel Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan perekonomian suatu negara dalam satu tahun tertentu yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional. Data Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari nilai PDB Indonesia tahun 1970-2017 yang bersumber dari data *Worldbank*. Variabel ini dinyatakan dalam miliaran rupiah.

b. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Penelitian ini menetapkan lima variabel bebas, yaitu sebagai berikut :

1) Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan

Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan ditunjukkan dengan jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan untuk sektor pendidikan dan kebudayaan pada APBN tahun 1970-2003. Selanjutnya pada tahun 2004-2017 diwakili oleh belanja negara menurut fungsi pendidikan. Variabel ini dinyatakan dalam miliaran rupiah.

2) Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan

Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan ditunjukkan dengan jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan untuk sektor kesehatan dan keluarga berencana pada APBN tahun 1970-2003. Selanjutnya pada tahun 2004-2017 diwakili oleh belanja negara menurut fungsi kesehatan. Variabel ini dinyatakan dalam miliaran rupiah.

3) Pengeluaran pemerintah di sektor Transportasi

Pengeluaran pemerintah di sektor transportasi merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor transportasi. Pengeluaran

pemerintah untuk transportasi ditunjukkan dengan jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan untuk sektor transportasi pada APBN tahun 1970-2003. Selanjutnya pada tahun 2004-2017 diwakili oleh belanja negara menurut fungsi transportasi . Variabel ini dinyatakan dalam miliaran rupiah.

4) Pengeluaran pemerintah di sektor pertanian

Pengeluaran pemerintah di sektor pertanian merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian. Pengeluaran pemerintah untuk pertanian ditunjukkan dengan jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan untuk sektor pertanian dan pengairan pada APBN tahun 1970-2003. Selanjutnya pada tahun 2004-2017 diwakili oleh belanja negara menurut fungsi pertanian. Variabel ini dinyatakan dalam miliaran rupiah.

5) Pengeluaran pemerintah di sektor pertahanan

Pengeluaran pemerintah di sektor pertahanan merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pertahanan. Pengeluaran pemerintah untuk pertahanan ditunjukkan dengan jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan untuk sektor pertahanan pada APBN tahun 1970-2003. Selanjutnya pada

tahun 2004-2017 diwakili oleh belanja negara menurut fungsi pertahanan. Variabel ini dinyatakan dalam miliaran rupiah.

2. Metode Analisis Data

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu investasi yang tidak dapat seketika mempengaruhi output. Sehingga dalam jangka pendek, pengeluaran berupa konsumsi yang habis dibelanjakan tidak berpengaruh langsung terhadap output. Sedangkan dalam jangka panjang, investasi pemerintah memiliki efek terhadap peningkatan output. Maka dari itu teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis data *time series* dengan model koreksi kesalahan (*Error Correction Model/ECM*). Analisis data dilakukan dengan bantuan program *Eviews* 8.

1) ECM (*Error Correction Model*)

ECM digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam jangka pendek dan penyesuaiannya yang cepat untuk kembali ke keseimbangan jangka panjangnya terhadap data *time series* untuk variabel-variabel yang memiliki kointegrasi. Pemodelan ECM merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi hubungan di antara variabel yang bersifat nonstationary. Dengan syarat bahwa pada sekelompok variabel *nonstationary*

terdapat suatu kointegrasi, maka pemodelan ECM dinyatakan valid. Syarat ini dinyatakan dalam teorema representasi *Engle-Granger* (Ariefianto, 2012: 142).

Adapun pertimbangan penggunaan alat analisis ECM karena mampu menyeimbangkan hubungan ekonomi jangka pendek variabel-variabel yang telah memiliki keseimbangan Atau hubungan ekonomi jangka panjang serta mampu mengkaji konsistensi model empiris dengan teori ekonomi.

Persamaan model jangka panjang ditunjukkan oleh:

$$\begin{aligned} \text{LnGDP} = & \beta_0 + \beta_1 \text{LnPENDIDIKANT} + \\ & \beta_2 \text{LnKESEHATANT} + \beta_3 \text{LnIPERTANIAN} \\ & + \beta_4 \text{LnTRANSPORTASIt} + \beta_4 \text{LnPERTAHANANT} \\ & + \text{et} \end{aligned}$$

Keterangan :

- LnGDPT : variabel PDB
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisiensi regresi variabel bebas kuantitatif
- Lnpendidikant : variabel pengeluaran atas pendidikan
- Lnkesehatant : variabel pengeluaran atas kesehatan

- $LnI_{pertanian}$: variabel pengeluaran atas pertahanan
- $Lntransportasi$: variabel pengeluaran atas transportasi
- $LnI_{pertahanan}$: variabel pengeluaran atas pertahanan
- et : Error Term

2) Uji Prasyarat

a. Uji Stasioneritas

Data dikatakan stasioner apabila memiliki sifat nilai rata-rata serta varians yang konstan. Sebaliknya, suatu data yang nonstasioner adalah memiliki rata-rata serta varians yang berubah (baik ditentukan secara fungsional deterministik tertentu) maupun random (Ariefianto, 2012: 129). *Unit root* digunakan untuk mengetahui stasioneritas data. Pengujian unit root yang dipilih adalah *augmented Dickey-Fuller* (ADF). Langkah yang dilakukan yaitu dengan menguji *unit root* pada level (1(0). Dengan melihat nilai ADF, Jika nilai ADF lebih besar dari nilai kritis (5%) berarti data bersifat *nonstasioner*. Sebaliknya jika nilai ADF lebih kecil nilai kritis berarti data bersifat *stationer*. Jika semua variabel bersifat *nonstationary*, estimasi terhadap model dapat dilakukan dengan teknik kointegrasi.

b. Uji Kointegrasi

Adanya kointegrasi merupakan syarat penggunaan *Error Correction Model* (ECM). Hubungan kointegrasi dipandang sebagai hubungan jangka panjang (ekuilibrium). Untuk mendeteksi adanya kointegrasi, dilakukan pengujian *Johansen Cointegration*. Jika nilai hitung statistik uji yaitu *trace statistic* dan *maximum eigenvalue* lebih besar dari nilai kritis maka hipotesis nol non-stasioner ditolak, yang berarti bahwa terdapat kointegrasi yang menjadi syarat ECM.

Pengujian kointegrasi antar variabel dapat dilakukan dengan metode *Engle-Granger* (1987) dan pendekatan *Johansen* (1988). Jika di dalam sebuah model terdapat lebih dari dua variabel, maka akan terdapat kemungkinan adanya lebih dari satu hubungan kointegrasi di dalam model tersebut. Secara umum, dengan jumlah variabel sebanyak n , maka jumlah hubungan kointegrasi di dalam model tersebut maksimal sebanyak $(n-1)$. Jika jumlah variabel di dalam model lebih banyak dari dua maka model tersebut tidak dapat diselesaikan dengan metode *Engle-Granger Test* karena metode ini hanya dapat mengakomodir maksimal sebanyak dua variabel dengan pendekatan *single equation*-nya (Ariefianto, 2012: 142). Oleh karena itu, di

dalam penelitian ini digunakan pendekatan *Johansen Cointegration Test*. Apabila nilai *trace statistic* lebih besar dari *critical value*, begitu juga dengan nilai *max eige stat* lebih besar dari *critical value*, dapat dikatakan bahwa dalam jangka panjang terdapat kointegrasi di dalam model persamaan tersebut.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Deskriptif

Statistika deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Statistika deskriptif mempunyai kegiatan mulai dari mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data. Penyajian data dapat berbentuk tabel, diagram, ukuran, dan gambar (Sugiyono, 2011:147).

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan variabel-variabel yang diteliti berupa PDB, anggaran sektor pendidikan, anggaran sektor kesehatan, anggaran sektor pertanian, anggaran sektor transportasi dan anggaran sektor pertahanan. Di bawah ini merupakan tabel statistik deskriptif dari variabel yang diolah dengan menggunakan *Ms. Excel*:

Tabel 4.1 Data Statistik Deskriptif

	PDB	Pendidikan	Kesehatan	Pertanian	Transportasi	Pertahanan
Mean	317560 344565 3360	3644072 7048226, 30	9224060 017844,7 4	6471797 905010,5	1685127 3328942, 10	2299919 8047500
Min	494603 726277 71	4985644 51900	1304609 49100	2812097 86300	1014965 00000	7623168 00000
Max	137676 624607 42300	1500900 0000000 0	6721370 0000000	4077410 0000000	1040807 0000000 0	1082938 0000000 0
Std. Dev	421070 223819 8810	4949688 0777758, 40	1501763 4676870, 10	9093450 248905,5	2673989 1047117	3192386 2638483, 10

Berdasarkan statistik data yang telah disajikan pada tabel, dapat diketahui selama tahun 1970-2015 rata-rata variabel terikat dalam penelitian ini, yaitu PDB sebesar 3.175.603.445.653.360 rupiah. Pada variabel bebas, rata-rata tertinggi dialami oleh variabel pendidikan sebesar 36.440.727.048.226,30 rupiah. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah untuk mengalokasikan minimal 20% APBN. Sedangkan rata-rata terendah dialami oleh variabel pertanian hanya sebesar 6.471.797.905.010,53 triliun. Standar deviasi tertinggi dialami oleh variabel pendidikan sebesar 49.496.880.777.758,40 rupiah sedangkan terendah pada variabel pertanian sebesar 9.093.450.248.905,58 rupiah. Nilai PDB tertinggi dialami pada tahun 2017 dan terendah dialami pada tahun 1980. Dari ketiga variabel bebas, yang memiliki nilai tertinggi masih dialami oleh variabel pendidikan pada tahun 2016, sedangkan yang

terendah justru dialami oleh variabel Kesehatan pada tahun 1980.

Gambaran dari variabel dependen dan masing-masing variabel independen sebagai berikut:

a. Deskripsi Produk Domestik Bruto

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jumlah data PDB yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 37 tahun.



Gambar 4.1 Perkembangan PDB Indonesia tahun 1980-2017 (Miliar Rupiah)

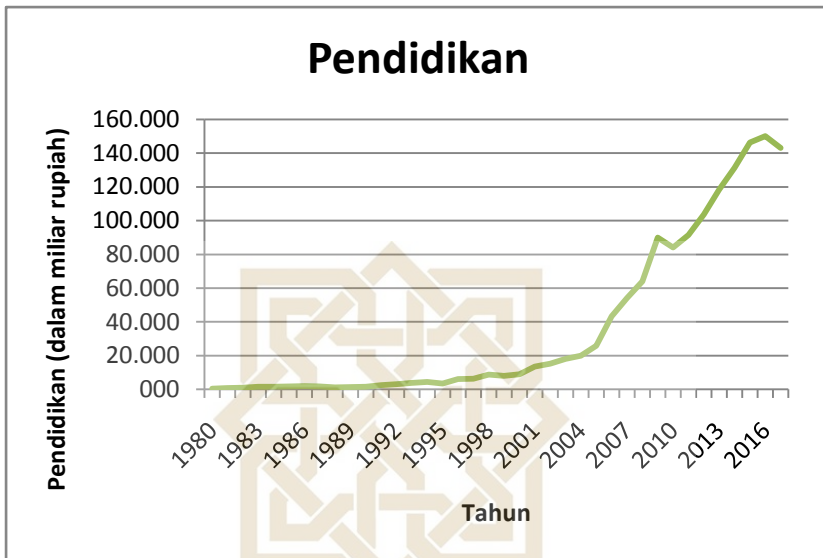
Sumber : Word Bank, di olah

Pada grafik tersebut, terlihat secara umum mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat. Namun, terjadi penurunan yang cukup signifikan saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 dan krisis ekonomi pada tahun 2008. Terjadinya krisis keuangan Asia pada pertengahan tahun 1997 dan semakin parah pada tahun 1998 terjadi penurunan nilai PDB yang cukup besar. Jika di lihat secara tren, 5 tahun terakhir PDB terus mengalami kenaikan dari tahun 2013 sekitar 11.122 Triliun sampai tahun 2017 sekitar 11.767 Triliun. Namun, mengalami sebesar 4% pada tahun 2014 dari 11.122 triliun menjadi hanya sekitar 11.077 triliun.

b. Deskripsi Pengeluaran pemerintah di Sektor Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan suatu syarat penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pendidikan menjadi faktor penentu kualitas sumber daya manusia yang kemudian akan memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk membangun sektor pendidikan dapat terlihat dari pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Perkembangan pengeluaran pemerintah di sektor

pendidikan dari tahun 1980 sampai 20157 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.2 Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan tahun 1980-2017 (miliaran rupiah)

Sumber : Nota Keuangan dan APBN tahun 1980-2017

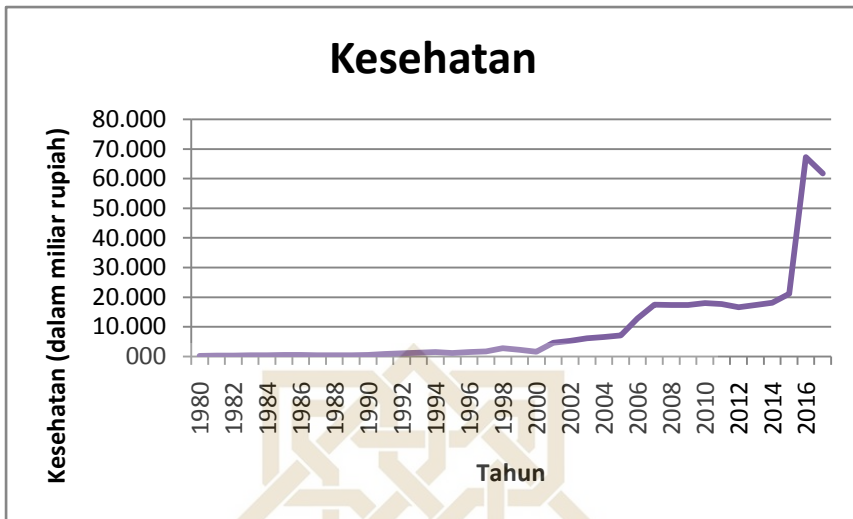
Dilihat dari grafik diatas terlihat bahwa sejak tahun 1980- 2017 pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki tren yang meningkat. Rata-rata perubahan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan hanya berkisar antara 0,1-0,9 persen. Kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari belanja negara sudah ada sejak UUD 1945 pasal 31, tetapi kenaikan anggaran yang cukup

signifikan terjadi sejak tahun 2003 saat adanya UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Sehingga dalam pembentukan UU pada tahun 2003 sektor pendidikan mengalami peningkatan terus menerus sampai sekarang.

c. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan

Dalam meningkatkan kebutuhan kesehatan masyarakat pemerintah melakukan berbagai kebijakan. Langkah yang dilakukan pemerintah yaitu dengan adanya UU no. 9 tahun 2009 tentang kesehatan yang mewajibkan anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara.

Kesehatan merupakan aset sekaligus sumberdaya untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial. kesehatan terkait secara langsung dengan kehidupan jangka panjang. Karena, semakin sehat seseorang maka semakin tinggi tingkat produktivitasnya. Oleh sebab itu kesehatan adalah hak asasi manusia, maka menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah dalam menyediakan prasarana kesehatan.



Gambar 4.3 Perkembangan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan tahun 1980-2017 (miliaran rupiah)

Sumber : Nota Keuangan dan APBN Tahun 1980-2017

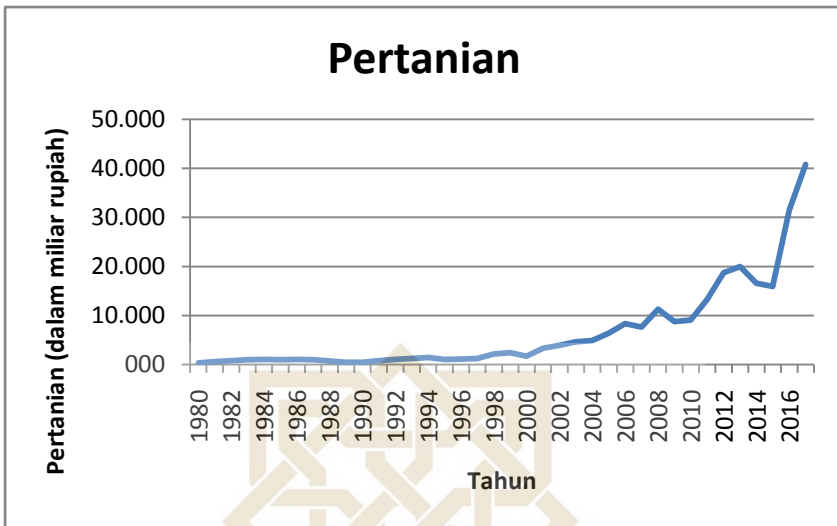
Periode tahun 1980-1995 anggaran pemerintah di sektor kesehatan cenderung konstan.

Pemerintah orde baru saat itu pernah mengalami masa kejayaan dalam bidang ekonomi yang memberikan dampak positif terhadap pembiayaan sektor kesehatan. Lahirnya konsep puskesmas dan posyandu yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Masa krisis 1997 merupakan masa terjadinya perubahan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Setelah krisis

pemerintah mengeluarkan program-program terkait perbaikan sektor kesehatan.pemerintah menerbitkan UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sehingga salah satu program pemerintah yaitu program Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Peningkatan yang paling signifikan sebesar 5,24 persen yaitu 21.113.200.000.000 rupiah pada tahun 2015 dan meningkat 61.724.500.000.000 rupiah pada tahun 2017.

d. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan bagian terpenting dalam suatu negara, Indonesia merupakan negara berkembang sehingga sektor pertanian sangat penting dalam meningkatkan perekonomian. Semakin baik keadaan sektor ekonominya, semakin sejahtera negara tersebut. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada lapangan usaha pertanian sebesar 32%, lebih besar dari lapangan usaha lainnya.



Gambar 4.4 Perkembangan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian tahun 1980-2017 (miliaran rupiah)

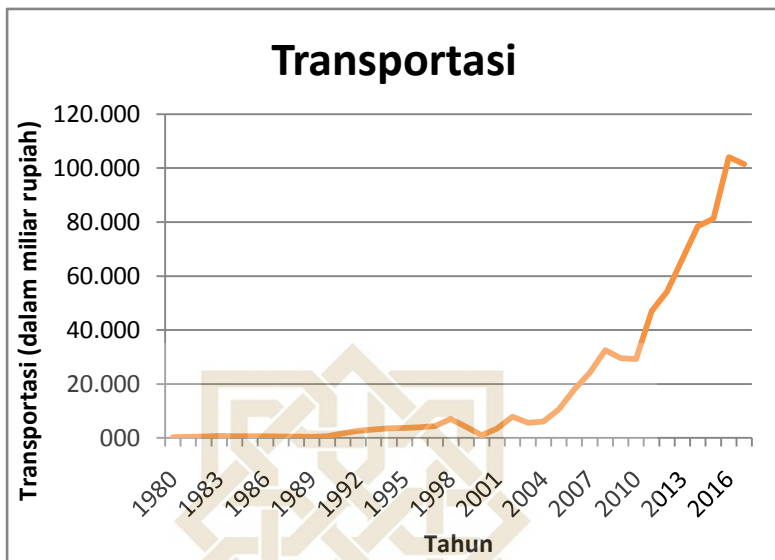
Sumber : Nota Keuangan dan APBN Tahun 1980-2017

Periode tahun 1980-2017 anggaran pemerintah di sektor pertanian cenderung meningkat. Pada tahun 2000 pengeluaran pemerintah di bidang pertanian mengalami peningkatan yang cukup baik hingga 2013. Selama periode ini, pengeluaran pemerintah yang paling tinggi terjadi pada tahun 2013, karena pengeluaran pemerintah untuk pertanian cukup diperhatikan. Anggaran pertanian ini digunakan berbagai program untuk memperbaiki kualitas pertanian di Indonesia. Namun setelah tahun 2013 justru

anggaran pertanian mengalami penurunan, Beberapa permasalahan yang menyebabkan penurunan pada sektor pertanian yaitu penurunan produksi, distribusi, dan permasalahan keterjangkauan harga. Namun mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2013 sampai 2017 Pada periode 2013 anggaran pertanian sebesar 19.925.500.000.000 rupiah dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 16.527.100.000.000 rupiah serta turun lagi pada tahun 2015 menjadi 15.879.300.000.000 rupiah. Namun mengalami peningkatan lagi pada tahun 2016 sebanyak 31.507.200.000.000 rupiah hingga sekarang.

e. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah di Sektor Transportasi

Sektor transportasi merupakan penyambung ekonomi yang ada di suatu negara. Ketika suatu negara memiliki transportasi yang memadai maka perekonomian yang ada di suatu negara tersebut akan berjalan dengan baik.



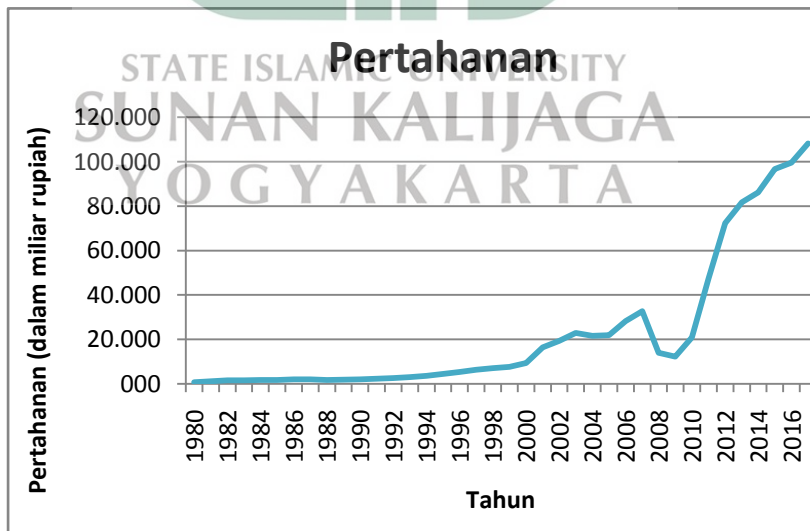
Gambar 4.5 Perkembangan pengeluaran pemerintah di sektor transportasi tahun 1980-2017 (miliaran rupiah)
 Sumber : Nota Keuangan dan APBN Tahun 1980-2017

Perkembangan pengeluaran atas transportasi yang memiliki tren yang cenderung konstan dari tahun 1980-1996. Pada rentang periode tersebut pemerintah banyak mengalokasikan pengeluaran transportasi untuk pembangunan jalan di pulau Jawa. Pengeluaran pemerintah atas transportasi mulai mengalami pergerakan yang fluktuatif setelah periode krisis 1999. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2000 sebesar 959.280.360.000 rupiah, dan mengalami kenaikan

tertinggi pada tahun 2005 hingga mencapai 10.617.113.600.000 rupiah. Pada tahun 2005 pemerintahmencanangkan perbaikan infrastruktur transportasi khususnya daerah terpencil. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2007 dan meningkatkembali hingga tahun 2017.

f. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertahanan

Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang sangat melimpah. Sektor pertahanan Indonesia masih menjadi masalah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Langkah yang harus dilakukan yaitu peningkatan teknologi dan pembaharuan senjata. Ketika keamanan terjaga maka stabilitas perekonomian negara akan baik.



Gambar 4.6 Perkembangan pengeluaran pemerintah di sektor pertahanan tahun 1980-2017 (miliaran rupiah)

Sumber : Nota Keuangan dan APBN Tahun 1980-2017

Perkembangan pengeluaran atas pertahanan yang memiliki tren yang cenderung konstan dari tahun 1980-2017. Namun mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2008-2009. Pada tahun 2009 dibenturkan dengan isu gun versus butter, sehingga mengakibatkan penurunan pada anggaran sektor pertahanan. Terlebih dengan kondisi Indonesia merupakan negara kepulauan akan lebih tinggi anggaran yang harus dikeluarkan.

2. Analisis Error Correction Model

a. Uji Stationeritas

Uji stasioneritas atau uji unit root bertujuan untuk memverifikasi bahwa data dalam penelitian bersifat stasioner. Uji stasioneritas dalam penelitian ini menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) dengan melihat nilai probability -nya. Jika nilai ADF lebih besar dari nilai probabilitas (5%) maka berarti data nonstasioner. Sebaliknya jika nilai ADF lebih kecil nilai kritis berarti data bersifat stasioner.

Tabel 4.2
Hasil Uji Akar Unit dan Uji Derajat Integrasi dengan
Uji ADF

Variabel	ADF					
	Level		1 st Difference		2 nd Difference	
	t-statistik	Prob.	t-statistik	Prob.	t-statistik	Prob.
PDB	4.09397	1.0000	-1.01774	0.7357	-2.47723	0.0000
Pendidikan	2.43990	1.0000	-3.72840	0.0077	-9.04009	0.0000
Kesehatan	5.02095	1.0000	2.10139	0.9998	-7.63707	0.0000
Pertanian	7.02667	1.0000	2.57046	1.0000	-5.96331	0.0000
Transportasi	-1.20080	0.6608	-0.46591	0.8846	-0.87042	0.0000
Pertahanan	4.31554	1.0000	1.18344	0.9972	-4.50678	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8

Pada tabel dapat dilihat bahwa variabel pengeluaran pemerintahatas pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi, pertahanan dan PDB belum stasioner dalam level dan pada tingkat 1st Difference, kemudian dilakukan uji derajat integrasi ke- (2nd Difference). Hasil uji derajat integrasi tingkat kedua terlihat bahwa enam variabel yang pada 2nd Difference sudah stasioner, sehingga hasil derajat integrasi kedua (2nd Difference) terlihat bahwa semua variabel yang diambil dalam penelitian ini telah stasioner.

Apabila derajat kombinasi linier dari variabel-variabel tersebut stasioner, maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut berkointegrasi. Untuk mengetahui hubungan kointegrasi tersebut, maka dilakukan uji kointegrasi.

b. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi digunakan untuk memberi indikasi awal bahwa model yang digunakan memiliki hubungan jangka panjang (*cointegration relation*). Hasil uji kointegrasi didapatkan dengan membentuk residual yang diperoleh dengan cara meregresikan variabel independen terhadap variabel dependen secara *Ordinary Least Square*. Residual tersebut harus stationer pada tingkat level untuk dapat dikatakan memiliki kointegrasi. Berikut ini adalah hasil *unit root test* pada uji kointegrasi pada tingkat level :

Tabel 4.3

Hasil Uji Kointegrasi

		T-statistic	Prob.
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-6.365479	0.0000
Test critical values	1% Level	-3.621023	
	5% Level	-2.943427	
	10% Level	-2.610263	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8

Pada tabel dapat dilihat bahwa kointegrasi antara variabel-variabel yang akan dipakai dalam penelitian ini. hal tersebut dapat dibuktikan melalui tingkat signifikansi probabilitas dari nilai residualnya yang lebih kecil dari nilai kritis 5 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa pengujian ini berhubungan kointegrasi pada semua model yang diajukan.

c. Model Jangka Panjang

Setelah diketahui bahwa variabel dependen dan variabel independensaling berkointegrasi, yang berarti terdapat keseimbangan dalam jangka panjang antar variabel tersebut. Ringkasan hasil estimasi koefisien jangka panjang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.4

Hasil Jangka Panjang

Variabel	Coeff.	t-Statistic	Prob.
LOG(PDB)	6.522066	10.12774	0.0000
LOG(Pendidikan)	0.990664	7.817970	0.0000
LOG(Kesehatan)	0.219458	2.148094	0.0394
LOG(Pertanian)	0.700083	4.226815	0.0002
LOG(Transportasi)	-0.049936	-2.371854	0.0239
LOG(Pertahanan)	0.452636	4.495974	0.0001
Prob. F-statistik	0.0000		
R-Squared	0.989328		

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai probabilitas F-statistik kurang dari 5 persen, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi, dan pertahanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi dalam model jangka panjang.

Sedangkan nilai R-squared menunjukkan angka 0.989. Hal ini berarti sebesar 0,98 persen variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Sedangkan sisanya, sebesar 99,2 persen (100% - 0,98%) dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Dari hasil estimasi tersebut, dalam jangka panjang probabilitas untuk variabel pendidikan sebesar 0.0000, kesehatan sebesar 0.0394, pertanian sebesar 0.0002, transportasi sebesar 0.0239, dan pertahanan 0.0001 signifikan pada taraf 5%.

d. Model Jangka Pendek

Tabel 4.5

Hasil Estimasi Jangka Pendek

Variabel	Coeff.	t-Statistic	Prob.
D(LOG(PDB))	0.138946	5.672877	0.0000
D(LOG(Pendidikan))	0.241737	2.891577	0.0071
D(LOG(Kesehatan))	-	-	0.0875
	0.112597	1.766280	
D(LOG(Pertanian))	-	-	0.2281
	0.184000	1.230415	
D(LOG(Transportasi))	-	-	0.7258
	0.003671	0.353959	
D(LOG(Pertahanan))	0.150488	-	0.1585
		2.192779	
Prob. F-Statistic		0.035972	
R-Squared		0.344812	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.03 kurang dari 5 persen, maka dapat dikatakan bahwa variabel sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi, dan pertahanan

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek.

Nilai R-squared menunjukkan angka 0.344, hal ini berarti bahwa sebesar 34,4 persen variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan sisanya sebesar 65,5 persen (100%-34,4%) dijelaskan oleh variabel di luar penelitian.

Dalam jangka pendek hanya variabel sektor pendidikan dan sektor pertahanan yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan variabel sektor kesehatan, sektor pertanian, sektor transportasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena variabel memiliki nilai probabilitas t-statistik lebih besar 5 persen.

B. Pembahasan

Merujuk pada hipotesis yang telah diajukan peneliti pada bab sebelumnya, pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi, dan Pertahanan terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial. Berikut penjelasan mengenai pengaruh masing-masing variabel berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dalam jangka panjang ataupun jangka pendek, signifikan dalam

mempengaruhi PDB Indonesia. Koefisien jangka panjang pengeluaran pemerintah sektor pendidikan adalah sebesar 0.990664. Hal ini berarti dalam jangka panjang, perubahan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan PDB sebesar 0,99 %. Terdapat hubungan positif antara sektor pendidikan terhadap PDB di Indonesia, arti bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah berdampak jangka panjang. Artinya ketika sektor pendidikan lebih dioptimalkan lagi maka akan lebih berdampak pada peningkatan PDB.

Dalam jangka pendek koefisien pengeluaran pemerintah sektor pendidikan adalah sebesar 0.241737. Hal ini berarti dalam jangka pendek, perubahan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan PDB sebesar 0,24 %.

Hal ini sesuai dengan teori menyarankan peran aktif kebijakan publik dalam meningkatkan pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung (Todaro dan Smith, 2012: 151). Karena dalam pengeluaran pemerintah tidak langsung memberikan dalam bentuk modal manusia. Bahkan para ahli jaman dahulu lebih menekankan modal manusia pada bentuk produksi. Sehingga yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan PDB yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan teknologi. Karena semakin besar pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan akan

meningkatkan modal manusia yang nantinya akan meningkatkan produktifitas.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Barro and Sala-i-Martin,1992) bahwa pengeluaran pemerintah atas pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan modal awal untuk membentuk sumber daya manusia lebih berkualitas. Pada dasarnya sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga kualitas dan kuantitas sumber tenaga kerja menentukan jumlah produksi.

2. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah atas kesehatan dalam jangka panjang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien jangka panjang pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan adalah sebesar 0.219458. Hal ini berarti dalam jangka panjang, perubahan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan PDB sebesar 0,21%. Artinya kebijakan pemerintah dalam menaikkan anggaran sektor kesehatan sebesar 5% berdampak positif terhadap jangka panjang PDB di Indonesia.

Jangka pendek dalam pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien jangka pendek pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan adalah

sebesar -0,112597. Hal ini berarti dalam jangka pendek, perubahan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan PDB sebesar -0,11%. Artinya dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah atas kesehatan memang belum dapat mempengaruhi peningkatan PDB, karena proses perbaikan kesehatan masyarakat melalui pengeluaran pemerintah tersebut tidak dapat langsung terlihat pengaruhnya. Terdapat tenggang waktu ketika pemerintah mengeluarkan sejumlah anggaran pembangunan untuk kesehatan dan sektor kesehatan bersifat konsumtif tidak berupa investasi. Maka tidak langsung berpengaruh langsung terhadap peningkatan PDB.

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Terkait dengan teori *human capital* bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi. (Todaro dan Smith, 2013). Sehingga kesehatan merupakan hal penting dalam mencapai sumber daya manusia yang lebih produktif. Sejalan dengan penelitian terdahulu Marlin Anggraeni (2017), pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

3. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah atas pertanian dalam jangka panjang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien jangka panjang pengeluaran pemerintah di sektor pertanian adalah sebesar 0.700083. Hal ini berarti dalam jangka panjang, perubahan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan PDB sebesar 0,70%. Adanya hubungan antara sektor pertanian dengan peningkatan PDB. Artinya kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengeluarkan program berdampak positif terhadap peningkatan PDB, hal ini sejalan dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

Jangka pendek dalam pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PDB. Koefisien jangka pendek pengeluaran pemerintah di sektor pertanian adalah sebesar -0,184000. Hal ini berarti dalam jangka pendek, perubahan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan PDB sebesar -0,18%. Karena program yang dilakukan pemerintah kebanyakan sifatnya adalah konsumtif, maka tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan PDB.

Menurut teori Sollow Pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi,

Pertumbuhan ekonomi tergantung pertumbuhan modal, penduduk dan teknologi (Sukirno, 2013 : 437). Ketika pengeluaran pemerintah di optimalkan dalam pemenuhan kebutuhan petani maka produksi akan bertambah. Maka ketika produksi bertambah maka akan banyak mengekspor dari pada mengimpor, hal ini dapat menambah PDB sehingga menaikkan pertumbuhan ekonomi.

4. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Transportasi

Variabel pengeluaran pemerintah atas sektor infrastruktur dalam pembahasan penelitian ini terdiri dari sektor transportasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi dalam jangka panjang signifikan namun tidak berpengaruh terhadap peningkatan PDB. Koefisien jangka panjang pengeluaran pemerintah di sektor transportasi adalah sebesar -0.049936. Hal ini berarti dalam jangka panjang, perubahan pengeluaran pemerintah di sektor transportasi sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan PDB sebesar -0,04%. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah terhadap sektor infrastruktur berpengaruh positif terhadap peningkatan PDB.

Jangka pendek dalam pengeluaran pemerintah pada sektor transportasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PDB. Koefisien jangka pendek pengeluaran pemerintah di sektor transportasi adalah sebesar -

0,003671. Hal ini berarti dalam jangka pendek, perubahan pengeluaran pemerintah di sektor transportasi sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan PDB sebesar -0,003%.

Penelitian dari World Bank(2004) mengemukakan bahwa rendahnya investasi dapat disebabkan olehrendahnya ketersediaan infrastruktur sehingga integrasi ekonomi tidakterwujud dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Sedangkan transportasi di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan, hal ini tidak dibarengi dengan peningkatan infrastruktur yang memadai. Sehingga kemacetanatau lama dalam mengkontribusikan barang dan jasa yang terjadi membuat kerugian yang cukup besar terhadap PDB.

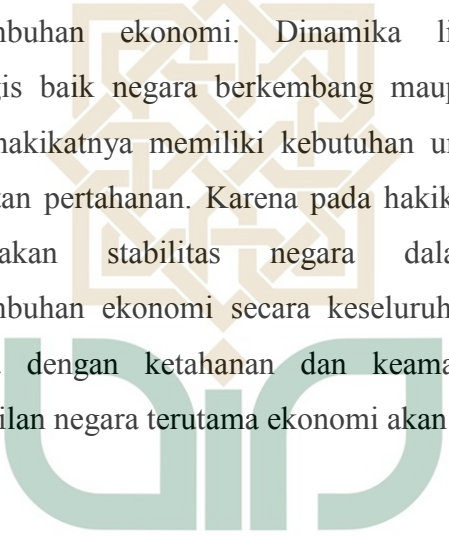
5. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertahanan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah atas pertahanan dalam jangka panjang signifikan terhadap peningkatan PDB. Koefisien jangka panjang pengeluaran pemerintah di sektor pertahanan adalah sebesar 0.452636. Hal ini berarti dalam jangka panjang, perubahan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan PDB sebesar 0,45%. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sektor pertahanan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jangka pendek dalam pengeluaran pemerintah pada sektor pertahanan tidak berpengaruh signifikan terhadap

peningkatan PDB. Koefisien jangka pendek pengeluaran pemerintah di sektor transportasi adalah sebesar 0.150488. Hal ini berarti dalam jangka pendek, perubahan pengeluaran pemerintah di sektor transportasi sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan PDB sebesar 0,15%.

Dalam penelitian sebelumnya menurut (Abu-dabe *etal.*, 2003), sektor pertahanan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dinamika lingkungan yang strategis baik negara berkembang maupun negara maju pada hakikatnya memiliki kebutuhan untuk membangun kekuatan pertahanan. Karena pada hakikatnya pertahanan merupakan stabilitas negara dalam melindungi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ketika suatu negara dengan ketahanan dan keamanan baik maka kestabilan negara terutama ekonomi akan baik.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh terhadap peningkatan PDB. Artinya program dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berdampak positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2. Hasil penelitian bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dalam jangka panjang berpengaruh terhadap peningkatan PDB. Dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap peningkatan PDB. Artinya fasilitas yang diberikan pemerintah mampu meningkatkan kualitas kesehatan, namun belum dapat dinikmati secara langsung dan membutuhkan proses yang panjang.
3. Hasil penelitian bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dalam jangka panjang berpengaruh terhadap peningkatan PDB. Sedangkan dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah di sektor pertanian tidak berpengaruh terhadap peningkatan PDB. Artinya fasilitas yang diberikan pemerintah mampu meningkatkan kualitas hasil pertanian, namun belum berdampak secara langsung.

4. Hasil penelitian bahwa pengeluaran pemerintah di sektor transportasi dalam jangka panjang signifikan namun tidak berpengaruh terhadap peningkatan PDB. Dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah di sektor transportasi tidak berpengaruh terhadap peningkatan PDB. Artinya sektor transportasi belum merata hanya berpusat pada daerah perkotaan, namun yang terjadi di perkotaan adalah kemacetan yang dapat merugikan pendapatan. Sehingga akibat penurunan pendapatan berpengaruh terhadap peningkatan PDB.
5. Hasil penelitian bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pertahanan dalam jangka panjang berpengaruh terhadap peningkatan PDB, sedangkan pada jangka pendek tidak berpengaruh terhadap peningkatan PDB. Artinya pengeluaran pemerintah untuk pertahanan dan keamanan dalam stabilitas negara berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia namun tidak dapat dirasakan secara langsung.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Data *times series* yang kurang banyak, hanya 37 tahun. Karena keterbatasan dalam ketersediaan data untuk beberapa variabel.
2. Besarnya pengeluaran pemerintah pada kelima sektor yang digunakan dalam penelitian kali ini merupakan data

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang belum memasukkan inflasi di dalamnya.

3. Pada hakikatnya penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas saja berupa pengeluaran pemerintah walaupun dijabarkan lagi ke dalam beberapa sektor.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ada banyak sekali. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya 5 variabel saja yang dianalisis.

C. Saran

1. Dalam jangka panjang dan jangka pendek pada pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh signifikan. Sebaiknya pemerintah lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan yang sebesar 20% APBN tersebut.
2. Dalam jangka panjang dan jangka pendek pada pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh signifikan. Sebaiknya pemerintah lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan yang sebesar 5% APBN tersebut.
3. Pada jangka panjang pengeluaran pemerintah di sektor pertanian terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pada jangka pendek tidak berpengaruh. Meskipun dalam jangka berpengaruh positif, tetapi pengaruhnya cukup kecil. Sektor ini perlu diperhatikan karena terjadi masalah dimana jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini paling banyak di

bandingkan sektor lain, tetapi kontribusi yang diberikan kepada PDB total termasuk sedikit.

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah atas transportasi signifikan dalam jangka panjang, namun tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Perlu ditingkatkan investasi swasta dalam transportasi sehingga dapat membantu pemerintah untuk menyediakan fasilitas jaringan transportasi yang baik bagi masyarakat. Terpenting jaringan transportasi antar daerah terutama daerah terpencil lebih diutamakan sehingga dapat berperan serta dalam pemerataan pembangunan.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah atas pertahanan signifikan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Hal ini harus diperhatikan lebih oleh pemerintah karena pertahanan negara sangatlah penting untuk menjaga stabilitas keamanan negara, terlebih Indonesia mempunyai penduduk yang banyak dan sumber daya alam yang melimpah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Tariqi, Abdullah Husain. *Ekonomi Islam : Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Abu-Dabe, Suleiman and Aamer S, 2003. "Government Expenditure, Military Spending and Economic Growth : Causality Evidence from Egypt, Israel and syiria.
- Muhammad Nur Afiat. (2015). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi Di Propinsi Sulawesi Tenggara*. Volume XVI Tahun 8, Desember 2015 hal 20-26
- Ariefianto, M.D. 2012. *Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi Dengan Menggunakan EvIEWS*. Jakarta: Erlangga.
- Anggraeni, Merlin. (2017). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015*. Skripsi : Universitas Negeri Yogyakarta
- Badan Pendidikan dan Pelatihan keuangan. 2018. Anggaran pendidikan 20%, apakah sudah dialokasikan?. *Artikel*. Kementrian Keuangan. www.bppk.kemenkeu.com .
- Badan pusat statistik. 2018. *Produk Domestik Bruto*. www.bps.go.id .
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Data Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha*. www.bps.go.id .
- Bank, T. W., Behrman, J. R., Lin, J., Pasay, H., Lee, K. S., & Srinivasan, T. N. (1995). *Human and physical infrastructure: public invesment and pricing policies in developing countries. Science, III*.
- Bastias, D. D. (2010). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009*. *Skripsi Fakultas EKonomi Universitas Diponegoro Semarang*, 1–141.

- Baum, Donald N and Shuanglin Lin. 1993. *The Differential Effects on Economic Growth of Government Expenditure on Education, Welfare, and Defense*. Journal of Economic Development.
- Bose, N., Haque, M. E., & Osborn, D. R. (2007). *Public Expenditure and Economic Growth: A Disaggregated Analysis for Developing Countries Financial structure View project Corruption (Governance) and Development View project Public Expenditure And Economic Growth: A Disaggregated Analysis For Developing*. 75(5).
- Cheng, B. S., & Lai, T. W. (1997). Government Expenditures and Economic Growth in South Korea : A VAR Approach. *Jornal of Economic Development*, 22(1), 11–24.
- Ghali, K. (1997). Government Spending and Economic Growth in Saudi Arabia. *Journal of Economic Development*, 22(2), 165–172.
- Data Worldbank. Tahun 1980- 2017. *Data GDP Indonesia*. www.data.worldbank.org
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Fiskal Departemen Keuangan. Tahun 1980-2017. *Nota Keuangan dan APBN Indonesia* . www.kemenkeu.go.id .
- Gujarati, dkk. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid II*. Jakarta: Erlangga.
- Ilyas, Marzuki. 1989. *Ilmu Keuangan Negara (Public Finance)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kuncoro. 2011. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP AAYKPN
- Kolluri, B. R., Panik, M. J., & Wahab, M. S. (2000). Government expenditure and economic growth: Evidence from G7 countries. *Applied Economics*, 32(8), 1059–1068.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1994. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE. Badan Kebijakan

- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Nurudeen, A., & Usman, A. (2010). *Government Expenditure And Economic Growth In Nigeria , 1970-2008 : A Disaggregated Analysis*. 2010, 1–11.
- Sadeq, Abul Hasan Muhammad. *Economic Development in Islam*. Malaysia: Pelanducation, 1991.
- Sarwoko. 2005. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Yogyakarta: Andi.
- Samuelson, Paul A., William D Nordhaus. 2005. *Pengantar Teori Ekonomi Edisi 11*. Jakarta: Erlangga
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suharyadi, Agus. 2016. *Statistik Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern: Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Selemba Empat.
- Personal, M., Archive, R., & Jiranyakul, K. (2013). *M P RA The Relation between Government Expenditures and Economic Growth in Thailand The Relation between Government Expenditures and Economic Growth in Thailand Working Paper (January 2007)*. 46070(11), 32.
- Rastogi, P. N. 2002. Knowledge Management and Intellectual Capital as a Paradigm of Value Creaction. Human Syestems Management.
- Saad, W., & Kalakech, K. (2009). The Nature of Government Expenditure and Its Impact on Sustainable Economic Growth. *Middle Eastern Finance and Economics*, 4(4), 38–47.
- Wahyuni, 2013. *Pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2000-2010*. Skripsi: universitas hassanudin makassar.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : terjemah dari bahasa arab

No.	Halaman	Surah dan Ayat/ Hadis	Terjemah
1	41	Q.S Al-Hud ayat 61	Dia yang menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya.
2	42	Q.S Al-maidah ayat 8	Berbuat adillah kamu sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketakwaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2 : Data Mentah

Tahun	GDP	Pendidikan	Kesehatan
1980	49460372627771,00	498564451900,00	130460949100,00
1981	59460704088803,00	808087404700,00	209221108000,00
1982	65542893359509,00	1147785670000,00	287340049000,00
1983	84867230972079,00	1653329886000,00	353235184000,00
1984	94259594959161,00	1713232488000,00	360699847000,00
1985	98278068339957,00	1749307172000,00	503073691000,00
1986	131379539141163,00	1938471295000,00	419614269000,00
1987	125283869229798,00	1763443266000,00	364910222000,00
1988	153513800702442,00	1264168230000,00	311679438000,00
1989	182160778520373,00	1401246828000,00	357762383000,00
1990	217524772783561,00	1611151691000,00	464754806000,00
1991	255310655694103,00	2518987083000,00	740691828000,00
1992	286857748847513,00	3188140769000,00	974237117000,00
1993	333394453243871,00	3832712586000,00	1223078860000,00
1994	389162726135657,00	4432831044000,00	1412663947000,00
1995	466520731803508,00	3579124129000,00	1119608780000,00
1996	541821926825050,00	6216590228000,00	1410129877000,00
1997	1003232174108100,00	6423826931000,00	1600976082000,00
1998	765950522838916,00	8869815391000,00	2679984507000,00
1999	994009602943750,00	8081655958000,00	2157387102000,00
2000	1583376612648240,00	9082378321000,00	1571087878000,00
2001	1668648255437650,00	13611800000000,00	4563000000000,00
2002	1749205862642610,00	15204275111000,00	5200680444000,00
2003	1987348863895190,00	18193938445000,00	6105728882000,00
2004	2386014645897970,00	20051065218000,00	6557709901000,00
2005	2810088526793070,00	25987390636000,00	7038102327000,00

2006	3288426050996060,00	43287400000000,00	12730300000000,00
2007	4071049453101410,00	54067138400000,00	17467051200000,00
2008	5587003553165230,00	64029169200000,00	17270310000000,00
2009	5072052804756570,00	89900000000000,00	17300000000000,00
2010	6789051570932390,00	84086500000000,00	18001800000000,00
2011	8097443839874180,00	91483000000000,00	17649400000000,00
2012	8875802062238740,00	103666700000000,00	16564500000000,00
2013	11122756702455900,00	118467100000000,00	17284000000000,00
2014	11077659207973800,00	131313600000000,00	18077700000000,00
2015	11890379098772900,00	146392800000000,00	21113200000000,00
2016	12550969195338500,00	150090000000000,00	67213700000000,00
2017	13767662460742300,00	143140900000000,00	61724500000000,00

Tahun	Pertanian	transportasi	Pertahanan
1980	281209786300,00	284972438800,00	762316800000,00
1981	534467171100,00	413750810000,00	1189315800000,00
1982	739773200000,00	541674647000,00	1583788000000,00
1983	921558868000,00	748933606000,00	1673276000000,00
1984	988672590000,00	686404491000,00	1719313000000,00
1985	915792446000,00	668775146000,00	1742665000000,00
1986	1008810646000,00	690701795000,00	1995602500000,00
1987	957342726000,00	506587626000,00	2069723900000,00
1988	698306428000,00	529179480000,00	1828351736000,00
1989	402870099000,00	437946447000,00	1928980114000,00
1990	415057681000,00	595989148000,00	2060595441000,00
1991	746687799000,00	1734695728000,00	2282324093000,00
1992	1014694768000,00	2614800458000,00	2653565052000,00
1993	1209014519000,00	3185708447000,00	3089856337000,00
1994	1365742911000,00	3660531734000,00	3637758550000,00

1995	1015017768000,00	3749401998000,00	4442763000000,00
1996	1078745309000,00	3985666435000,00	5311003420000,00
1997	1177030885000,00	4413447524000,00	6398509363000,00
1998	2091943522000,00	7068600000000,00	7068600000000,00
1999	2357099891000,00	4105902463000,00	7671958297000,00
2000	1650794892000,00	959280360000,00	9453355280000,00
2001	3253000000000,00	3531600000000,00	16415800000000,00
2002	3867582000000,00	7933200000000,00	19291200000000,00
2003	4594377219000,00	5635941127000,00	23027403888000,00
2004	4867188020000,00	6065743591000,00	21680182834000,00
2005	6345639246000,00	10617113600000,00	22000971700000,00
2006	8345700000000,00	18013800000000,00	28277600000000,00
2007	7570300000000,00	24213446000000,00	32700000000000,00
2008	11241800000000,00	32534194900000,00	13986445700000,00
2009	8716800000000,00	29600000000000,00	12300000000000,00
2010	9004700000000,00	29200000000000,00	20968200000000,00
2011	13219900000000,00	47000000000000,00	47418700000000,00
2012	18717500000000,00	54200000000000,00	72472800000000,00
2013	19925500000000,00	66300000000000,00	81800000000000,00
2014	16527100000000,00	78400000000000,00	86300000000000,00
2015	15879300000000,00	81338200000000,00	96823900000000,00
2016	31507200000000,00	104080700000000,00	99648900000000,00
2017	40774100000000,00	101496500000000,00	108293800000000,00

Lampiran 3 : Hasil Regresi Dari Eviews 8

Lampiran 3.1 Data Analisis Deskriptif

	PDB	Pendidikan	Kesehatan	Pertanian	Transportasi	Pertahanan
Mean	3175603 4456533 60	364407270482 26,30	92240600 17844,74	6471797 905010,5	16851273328 942,10	22999198047 500
Min	4946037 2627771	498564451900	13046094 9100	2812097 86300	10149650000 0	76231680000 0
Max	1376766 2460742 300	1500900000000 000	67213700 000000	4077410 0000000	10408070000 0000	10829380000 0000
Std. Dev	4210702 2381988 10	494968807777 58,40	15017634 676870,1 0	9093450 248905,5	26739891047 117	31923862638 483,10

Microsoft Exel 2010

Adapun rumus yang digunakan yaitu :

- N = SUM(*number1*; [*number2*]; ...)
- Minimum = MIN(*number1*; [*number2*]; ...)
- Maximum = MAX(*number1*; [*number2*]; ...)
- Mean = EVERAGE(*number1*; [*number2*]; ...)
- Standar Deviasi = STDEV(*number1*; [*number2*]; ...)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 3.2 Uji Stationeritas ADF Tingkat Level

a. PDB

Null Hypothesis: GDP has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	4.093974	1.0000
Test critical values: 1% level	-3.621023	
5% level	-2.943427	
10% level	-2.610263	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

b. Pendidikan

Null Hypothesis: PENDIDIKAN has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	2.463990	1.0000
Test critical values: 1% level	-3.621023	
5% level	-2.943427	
10% level	-2.610263	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

c. Kesehatan

Null Hypothesis: KESEHATAN has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 9 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	5.020955	1.0000
Test critical values: 1% level	-3.689194	
5% level	-2.971853	
10% level	-2.625121	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

d. Pertanian

Null Hypothesis: PERTANIAN has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	7.026672	1.0000
Test critical values: 1% level	-3.646342	
5% level	-2.954021	
10% level	-2.615817	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

e. Transportasi

Null Hypothesis: TRANSPORTASI has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 7 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.200806	0.6608
Test critical values: 1% level	-3.670170	
5% level	-2.963972	
10% level	-2.621007	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

f. Pertahanan

Null Hypothesis: PERTAHANAN has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 9 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	4.315544	1.0000
Test critical values: 1% level	-3.689194	
5% level	-2.971853	
10% level	-2.625121	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

Lampiran 3.3 Uji Stationeritas ADF Tingkat 1st Difference

a. PDB

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.017704	0.7357
Test critical values: 1% level	-3.639407	
5% level	-2.951125	
10% level	-2.614300	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

b. Pendidikan

Null Hypothesis: D(PENDIDIKAN) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.728405	0.0077
Test critical values: 1% level	-3.626784	
5% level	-2.945842	
10% level	-2.611531	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

c. Kesehatan

Null Hypothesis: D(KESEHATAN) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 9 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	2.101392	0.9998
Test critical values: 1% level	-3.699871	
5% level	-2.976263	
10% level	-2.627420	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

d. Pertanian

Null Hypothesis: D(PERTANIAN) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 9 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	2.570469	1.0000
Test critical values: 1% level	-3.699871	
5% level	-2.976263	
10% level	-2.627420	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

e. Transportasi

Null Hypothesis: D(TRANSPORTASI) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 6 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-0.465917	0.8846
Test critical values: 1% level	-3.670170	
5% level	-2.963972	
10% level	-2.621007	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

f. Pertahanan

Null Hypothesis: D(PERTAHANAN) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 9 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	1.183442	0.9972
Test critical values: 1% level	-3.699871	
5% level	-2.976263	
10% level	-2.627420	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

Lampiran 3.4 Uji Stationeritas ADF Tingkat 2nd Difference

a. PDB

Null Hypothesis: D(GDP,2) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 9 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.477227	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.711457	
5% level	-2.981038	
10% level	-2.629906	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

b. Pendidikan

Null Hypothesis: D(PENDIDIKAN,2) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-9.040097	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.632900	
5% level	-2.948404	
10% level	-2.612874	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

c. Kesehatan

Null Hypothesis: D(KESEHATAN,2) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 8 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-7.637076	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.699871	
5% level	-2.976263	
10% level	-2.627420	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

d. Pertanian

Null Hypothesis: D(PERTANIAN,2) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-5.963315	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.661661	
5% level	-2.960411	
10% level	-2.619160	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

e. Transportasi

Null Hypothesis: D(TRANSPORTASI,2) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 9 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-0.870427	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.711457	
5% level	-2.981038	
10% level	-2.629906	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

f. Pertahanan

Null Hypothesis: D(PERTAHANAN,2) has a unit root		
Exogenous: Constant		
Lag Length: 9 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.506786	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.711457	
5% level	-2.981038	
10% level	-2.629906	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

Lampiran 3.5 Uji Kointegrasi

Null Hypothesis: ECM has a unit root				
Exogenous: Constant				
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)				
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.365479			0.0000
Test critical values:				
1% level	-3.621023			
5% level	-2.943427			
10% level	-2.610263			
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.				
Augmented Dickey-Fuller Test Equation				
Dependent Variable: D(ECM)				
Method: Least Squares				
Date: 06/20/19 Time: 11:03				
Sample (adjusted): 1981 2017				
Included observations: 37 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ECM(-1)	-1.069894	0.168078	-6.365479	0.0000
C	-0.002588	0.031364	-0.082522	0.9347
R-squared	0.536542	Mean dependent var		-0.003801
Adjusted R-squared	0.523301	S.D. dependent var		0.276317
S.E. of regression	0.190779	Akaike info criterion		-0.422866
Sum squared resid	1.273879	Schwarz criterion		-0.335790
Log likelihood	9.823028	Hannan-Quinn criter.		-0.392168
F-statistic	40.51932	Durbin-Watson stat		1.993669
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 3.6 Uji Jangka Panjang

Dependent Variable: LOG(GDP)				
Method: Least Squares				
Date: 06/19/19 Time: 21:06				
Sample: 1980 2017				
Included observations: 38				
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 4.0000)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PENDIDIKAN)	0.990664	0.126716	7.817970	0.0000
LOG(KESEHATAN)	0.219458	0.102164	2.148094	0.0394
LOG(PERTANIAN)	0.700083	0.165629	-4.226815	0.0002
LOG(TRANSPORTASI)	-0.049936	0.021053	-2.371854	0.0239
LOG(PERTAHANAN)	0.452636	0.100676	4.495974	0.0001
C	6.522066	0.643980	10.12774	0.0000
R-squared	0.989328	Mean dependent var	34.47242	
Adjusted R-squared	0.987661	S.D. dependent var	1.807629	
S.E. of regression	0.200794	Akaike info criterion	0.229140	
Sum squared resid	1.290177	Schwarz criterion	0.029426	
Log likelihood	10.35366	Hannan-Quinn criter.	0.137144	
F-statistic	593.3236	Durbin-Watson stat	2.130852	
Prob(F-statistic)	0.000000	Wald F-statistic	1590.118	
Prob(Wald F-statistic)	0.000000			

Lampiran 3.7 Jangka Pendek

Dependent Variable: D(LOG(GDP))				
Method: Least Squares				
Date: 06/20/19 Time: 11:07				
Sample (adjusted): 1981 2017				
Included observations: 37 after adjustments				
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 4.0000)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LOG(PENDIDIKAN))	0.241737	0.083600	2.891577	0.0071
D(LOG(KESEHATAN))	-0.112597	0.063748	-1.766280	0.0875
D(LOG(PERTANIAN))	-0.184000	0.149543	-1.230415	0.2281
D(LOG(TRANSPORTAS I))	-0.003671	0.010372	-0.353959	0.7258
D(LOG(PERTAHANAN))	0.150488	0.104072	1.445992	0.1585
ECM(-1)	-0.493308	0.224969	-2.192779	0.0362
C	0.138946	0.024493	5.672877	0.0000
R-squared	0.344812	Mean dependent var		0.152133
Adjusted R-squared	0.213774	S.D. dependent var		0.147799
S.E. of regression	0.131053	Akaike info criterion		1.057779
Sum squared resid	0.515243	Schwarz criterion		0.753011
Log likelihood	26.56891	Hannan-Quinn criter.		0.950334
F-statistic	2.631392	Durbin-Watson stat		2.206686
Prob(F-statistic)	0.035972	Wald F-statistic		3.020592
Prob(Wald F-statistic)	0.019753			

Lampiran 4 : Curriculum Vitae (CV)**A. Biodata Pribadi**

Nama Lengkap : Yuyun Aqidah
TTL : Kendal, 21 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Sentul Rt 10 Rw 09 Sukorejo, Kendal
E-mail : yuyun.aqidah2196@gmail.com
No.HP : 085641270307

B. Riwayat Pendidikan

2003 - 2008 : SDN 1 Sukorejo
2008 – 2011 : Mts NU 13 Ar-Rahmat Sukorejo
2011 – 2014 : SMK 17 Parakan Temanggung
2015 – 2019 : UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

2012 – 2013 : OSIS SMK 17 Parakan Temanggung
2015 – 2017 : Pengurus HMI Febi UIN Sunan
Kalijaga

